

PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK

**Laporan Keuangan Interim Konsolidasian
Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada 30 Juni 2017 (Tidak Diaudit)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
PERIODE 6 BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017**

DAFTAR ISI

Pernyataan Direksi

	Ekshibit
Laporan Posisi Keuangan Interim Konsolidasian	A
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Interim Konsolidasian	B
Laporan Perubahan Ekuitas Interim Konsolidasian	C
Laporan Arus Kas Interim Konsolidasian	D
Catatan atas Laporan Keuangan Interim Konsolidasian	E

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 JUNI 2017**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA**

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. Nama : Muhammad Ramdani Basri
Alamat Kantor : Equity Tower Lantai 38
Sudirman Central Business District (SCBD)
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Lot 9, Jakarta 12190
Alamat Domisili : Jl. Mendut No. 3, Menteng, Jakarta Pusat
Nomor Telepon : +6221-515 0100
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Danni Hasan
Alamat Kantor : Equity Tower Lantai 38
Sudirman Central Business District (SCBD)
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Lot 9, Jakarta 12190
Alamat Domisili : Jl. Darmawangsa X No. 46, Cipete Utara, Jakarta Selatan
Nomor Telepon : +6221-515 0100
Jabatan : Direktur

menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan interim konsolidasian PT Nusantara Infrastructure Tbk (Perusahaan) dan Entitas Anaknya;
2. Laporan keuangan interim konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anaknya telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan interim konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anaknya telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan interim konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anaknya tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan dan Entitas Anaknya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama dan mewakili Dewan Direksi
Jakarta, 28 Juli 2017


Muhammad Ramdani Basri
Direktur Utama




Danni Hasan
Direktur

PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
PER 30 JUNI 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>30 Juni 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
A S E T			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	4	527.315.126.469	624.321.538.450
Aset keuangan yang tersedia untuk dijual	5	65.058.880.000	-
Investasi jangka pendek	6	150.022.603.650	150.022.603.650
Piutang usaha	7		
Pihak ketiga		85.013.075.620	75.986.984.916
Pihak berelasi		90.796.617	-
Piutang non-usaha			
Pihak ketiga		68.598.846.565	58.259.296.291
Pihak berelasi	36	47.812.173.268	49.391.105.959
Uang muka investasi dan piutang investasi	9	263.432.930.310	252.304.318.265
Pajak dibayar di muka	20a	72.989.801.127	90.898.253.614
Persediaan	10	12.334.755.064	13.078.650.892
Uang muka dan beban dibayar di muka	8	111.008.626.481	50.567.932.757
Bank yang dibatasi penggunaannya	11	44.921.716.189	46.555.017.512
Jumlah Aset Lancar		1.448.599.331.360	1.411.385.702.306
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang atas perjanjian konsesi jasa	15a	85.813.263.944	83.672.503.223
Aset pajak tangguhan - bersih	20e	82.795.515.454	86.085.358.843
Investasi pada entitas asosiasi	12	389.572.771.157	358.743.630.299
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 67.249.909.370 tahun 2017 dan Rp 57.740.006.408 tahun 2016	14	203.471.711.073	201.144.275.649
Properti investasi - nilai wajar	13	1.654.187.863.762	1.591.479.705.489
Aset takberwujud atas perjanjian konsesi, bersih	15b	1.333.342.138.093	1.330.553.030.663
Sewa dibayar di muka jangka panjang	8	168.668.654.898	141.780.568.307
Uang muka pembelian aset tetap dan properti investasi jangka panjang	8	14.012.513.698	15.283.139.604
Aset takberwujud lainnya	16	295.260.416.285	295.260.416.285
Aset tidak lancar lainnya		4.368.923.793	6.296.958.320
Jumlah Aset Tidak Lancar		4.231.493.772.157	4.110.299.586.682
JUMLAH ASET		5.680.093.103.517	5.521.685.288.988

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Interim Konsolidasian
pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Laporan Keuangan Interim Konsolidasian secara keseluruhan

PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
PER 30 JUNI 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	30 Juni 2017	31 Desember 2016
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang bank jangka pendek	17	35.000.000.000	35.000.000.000
Utang usaha - Pihak ketiga	18	24.016.150.507	43.661.723.838
Utang non-usaha - Pihak ketiga	19	150.555.008.147	137.401.185.022
Beban akrual		33.293.318.948	21.318.282.023
Utang pajak	20b	18.704.704.684	29.426.047.328
Provisi pemeliharaan jalan tol jangka pendek		2.013.603.373	2.079.000.000
Pendapatan diterima di muka	21	8.511.354.417	2.434.037.211
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun			
Utang pembiayaan konsumen	22	1.399.151.087	3.292.827.026
Pinjaman jangka panjang	23,38	167.292.409.739	178.737.482.876
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		440.785.700.902	453.350.585.324
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun			
Utang pembiayaan konsumen	22	672.534.344	2.117.219.253
Pinjaman jangka panjang	23	2.134.330.213.471	2.151.157.691.699
Utang usaha - Pihak ketiga	18	2.742.732.780	3.138.411.906
Pendapatan diterima di muka jangka panjang	21	69.762.861.625	61.985.605.496
Jaminan pelanggan		2.121.231.000	2.036.740.999
Liabilitas pajak tangguhan	20e	122.052.849.074	118.824.164.631
Provisi pemeliharaan jalan tol jangka panjang		1.174.804.265	1.012.796.773
Liabilitas imbalan pasca-kerja	37	37.050.599.376	36.067.939.047
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		2.369.907.825.935	2.376.340.569.804
JUMLAH LIABILITAS		2.810.693.526.837	2.829.691.155.128
EKUITAS			
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk			
Modal saham - nilai nominal Rp 35 per saham			
Seri A dan Rp 70 per saham Seri B			
Modal dasar - 2 saham Seri A dan 20.257.142.856 saham Seri B			
Modal ditempatkan dan disetor penuh -			
1 saham Seri A dan 15.235.671.879 saham Seri B	24	1.066.497.031.565	1.066.497.031.565
Tambahan modal disetor - bersih	25	155.638.281.853	155.638.281.853
Modal saham yang diperoleh kembali	24	(84.522.927.500)	(84.522.927.500)
Penghasilan komprehensif lain		5.058.880.000	-
Komponen ekuitas lainnya	26	542.447.958.013	534.394.007.845
Saldo laba		478.267.436.664	353.276.105.325
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk		2.163.386.660.595	2.025.282.499.088
Kepentingan nonpengendali	27	706.012.916.085	666.711.634.772
Jumlah Ekuitas		2.869.399.576.680	2.691.994.133.860
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		5.680.093.103.517	5.521.685.288.988

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Interim Konsolidasian
pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Laporan Keuangan Interim Konsolidasian secara keseluruhan

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN INTERIM KONSOLIDASIAN
PERIODE 6 BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	Catatan	2 0 1 7	2 0 1 6
PENDAPATAN DAN PENJUALAN			
Pendapatan usaha dan penjualan	29	353.935.156.960	317.318.958.422
Pendapatan jasa konsesi		1.235.836.470	6.681.424.318
Pendapatan konstruksi	30	1.299.695.100	273.628.053
Jumlah		356.470.688.530	324.274.010.793
BEBAN LANGSUNG DAN BEBAN POKOK PENJUALAN			
Beban langsung dan beban pokok penjualan	31	(91.574.082.690)	(81.258.323.347)
Beban jasa konsesi	31	(545.755.726)	(2.950.572.888)
Beban konstruksi	30	(1.181.541.000)	(248.752.775)
Jumlah		(93.301.379.416)	(84.457.649.010)
LABA BRUTO		263.169.309.114	239.816.361.783
Beban umum dan administrasi	32	(74.599.703.130)	(79.078.854.272)
Penghasilan (beban) operasi lainnya, bersih		2.513.553.585	20.765.587.156
LABA USAHA		191.083.159.569	181.503.094.667
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN			
Penghasilan keuangan	33	13.239.229.369	27.698.855.694
Beban keuangan	34	(79.134.533.456)	(87.462.616.078)
Bagian laba bersih entitas asosiasi	12	30.829.140.858	20.235.802.456
Denda pajak		-	(1.928.050.792)
Kenaikan nilai wajar properti investasi	13	46.775.369.169	46.775.369.169
LABA SEBELUM PAJAK		202.792.365.509	186.822.455.116
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	20c,e		
Kini		(20.386.523.000)	(17.342.828.250)
Tangguhan		(6.518.527.935)	991.190.518
JUMLAH BEBAN PAJAK PENGHASILAN		(26.905.050.935)	(16.351.637.732)
LABA TAHUN BERJALAN		175.887.314.574	170.470.817.384
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi			
Laba yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual		5.058.880.000	2.000.375.000
LABA KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN, SETELAH PAJAK		5.058.880.000	2.000.375.000
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		180.946.194.574	172.471.192.384
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk		124.991.331.339	108.927.817.565
Kepentingan nonpengendali	27	50.895.983.235	61.542.999.819
		175.887.314.574	170.470.817.384
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk		130.050.211.339	110.928.192.565
Kepentingan nonpengendali	27	50.895.983.235	61.542.999.819
		180.946.194.574	172.471.192.384
LABA PER SAHAM			
Dasar	28	8,20	7,15

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Interim Konsolidasian
pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Laporan Keuangan Interim Konsolidasian secara keseluruhan

Ekshibit C

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
PERIODE 6 BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	Laba Komprehensif Lainnya	Komponen Ekuitas Lainnya	Saham Dibeli kembali	Laba ditahan	Jumlah	Kepentingan Non-Pengendali	Jumlah Ekuitas - Bersih
Saldo 1 Januari 2016	1.066.497.031.565	155.638.281.853	(13.688.548.327)	520.777.574.482	(84.522.927.500)	204.955.715.903	1.849.657.127.976	754.832.383.346	2.604.489.511.322
Keuntungan belum direalisasi atas kenaikan nilai wajar aset tersedia untuk dijual	-	-	2.000.375.000	-	-	-	2.000.375.000	-	2.000.375.000
Selisih nilai transaksi dengan pihak non-pengendali	-	-	-	(22.164.135.391)	-	-	(22.164.135.391)	-	(22.164.135.391)
Dividen anak	-	-	-	-	-	-	-	(8.247.686.903)	(8.247.686.903)
Laba bersih (Tidak diaudit)	-	-	-	-	-	108.927.817.565	108.927.817.565	61.542.999.819	170.470.817.384
Saldo 30 Juni 2016	1.066.497.031.565	155.638.281.853	(11.688.173.327)	498.613.439.091	(84.522.927.500)	313.883.533.468	1.938.421.185.150	808.127.696.262	2.746.548.881.412
Saldo 1 Januari 2017	1.066.497.031.565	155.638.281.853	-	534.394.007.845	(84.522.927.500)	353.276.105.325	2.025.282.499.088	666.711.634.772	2.691.994.133.860
Keuntungan belum direalisasi atas kenaikan nilai wajar aset tersedia untuk dijual	-	-	5.058.880.000	-	-	-	5.058.880.000	-	5.058.880.000
Selisih nilai transaksi dengan pihak non-pengendali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividen anak	-	-	-	8.053.950.168	-	-	-	(11.594.701.922)	(11.594.701.922)
Laba bersih (Tidak diaudit)	-	-	-	-	-	124.991.331.339	124.991.331.339	50.895.983.235	175.887.314.574
Saldo 30 Juni 2017	1.066.497.031.565	155.638.281.853	5.058.880.000	542.447.958.013	(84.522.927.500)	478.267.436.664	2.163.386.660.595	706.012.916.085	2.869.399.576.680

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Interim Konsolidasian
pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Laporan Keuangan Interim Konsolidasian secara keseluruhan

PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
PERIODE 6 BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2017	2016
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan kas dari pelanggan	355.391.432.579	327.588.736.362
Penerimaan bunga	13.239.229.369	21.506.641.697
Bank yang dibatasi penggunaannya	(1.633.301.323)	449.526.146
Pembayaran pajak penghasilan	(25.149.570.849)	(29.994.682.681)
Pembayaran beban bunga dan keuangan	(79.134.533.456)	(79.809.557.407)
Pembayaran kepada pemasok dan operasi lainnya	(109.031.202.607)	(107.457.904.149)
KAS BERSIH YANG DIPEROLEH DARI		
AKTIVITAS OPERASI	153.682.053.713	132.282.759.968
ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS INVESTASI		
Pembayaran uang muka pembelian properti investasi	(60.440.693.724)	(314.310.030.250)
Pembelian investasi surat berharga	(60.000.000.000)	-
Pembayaran sewa tanah jangka panjang	(26.888.086.591)	(7.506.380.966)
Kenaikan piutang investasi	(11.128.612.045)	(1.497.763.426)
Pembayaran uang muka investasi	(1.432.087.905)	(84.906.452.000)
Kenaikan piutang konsesi	(2.140.760.721)	(248.752.775)
Penerimaan hasil penjualan aset tetap	201.250.000	-
Perolehan aset tetap dan aset tetap tak berwujud - hak pengelolaan jalan tol	(44.992.526.559)	(63.875.186.903)
KAS BERSIH YANG DIGUNAKAN UNTUK		
AKTIVITAS INVESTASI	(206.821.517.545)	(472.344.566.320)
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan pinjaman dari bank dan lembaga keuangan	24.623.044.922	489.202.176.730
Penerimaan pinjaman pihak berelasi	6.764.671.059	13.128.124.432
Pembayaran sewa pembiayaan	(318.642.286)	(312.763.122)
Pembayaran dividen	(6.640.106.242)	(2.775.841.970)
Pembayaran pokok utang bank	(14.192.379.865)	(19.758.733.775)
Penerimaan utang lain-lain	(54.103.535.737)	3.339.305.350
KAS BERSIH YANG DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK)		
AKTIVITAS PENDANAAN	(43.866.948.149)	482.822.267.645
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(97.006.411.981)	142.760.461.293
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	624.321.538.450	637.430.396.984
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	527.315.126.469	780.190.858.277

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Laporan Keuangan Interim Konsolidasian secara keseluruhan

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
PERIODE 6 BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. U M U M

a. Pendirian Perusahaan

PT Nusantara Infrastructure Tbk ("Perusahaan") didirikan dengan nama PT Sawitia Bersama Darma di Jakarta berdasarkan Akta Notaris No. 3 tanggal 1 September 1995 dari Abdullah Ashal, S.H., notaris di Jakarta. Akta Pendirian Perusahaan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-17.375.HT.01.01.Tahun1995 tanggal 28 Desember 1995 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 15, Tambahan No. 1140 tanggal 20 Februari 2001.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 23 tanggal 12 Mei 2015 dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, mengenai perubahan anggaran dasar untuk disesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 32/POJK.04/2014 dan No. 33/POJK.04/2014. Akta perubahan tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0937940 tanggal 8 Juni 2015.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan terutama bergerak dalam bidang jasa, perdagangan dan pembangunan yang berhubungan dengan bidang usaha infrastruktur, pertambangan, minyak dan gas bumi. Saat ini kegiatan utama Perusahaan adalah melakukan investasi pada beberapa perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan jalan tol (Tangerang dan Makassar), jasa pelabuhan, jasa telekomunikasi, pengolahan air, perdagangan dan pembangunan. Perusahaan memulai kegiatan operasinya secara komersial pada tanggal 2 Januari 2000.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan Kantor beralamat di Menara Equity lantai 38, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190.

b. Penawaran Umum Saham Perusahaan

Pada tanggal 29 Juni 2001, Perusahaan memperoleh Pernyataan Efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dengan Surat No. S-1609/PM/2001 untuk melakukan penawaran umum perdana 60.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham, dengan harga penawaran Rp 200 per saham. Pada tanggal 18 Juli 2001, seluruh saham tersebut telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Pada tanggal 14 Juli 2010, Perusahaan memperoleh Pernyataan Efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) dengan suratnya No. S-6435/BL/2010 untuk melakukan penawaran umum terbatas dengan menerbitkan HMETD kepada pemegang saham terdaftar pada atau sebelum 26 Juli 2010. Melalui HMETD, yang berlaku sampai 3 Agustus 2010, para pemegang saham dapat membeli 8.508.000.000 saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp 70 per saham dengan harga penawaran Rp 88 per saham. Pada tahun 2010, 8.476.500.000 saham Seri B telah diterbitkan dan disetor penuh sehubungan dengan HMETD.

Seiring dengan penerbitan HMETD, untuk setiap 5 HMETD, Perusahaan menerbitkan 1 (satu) Waran Seri I diberikan secara gratis. Pemegang Waran Seri I bisa membeli saham Seri B dengan nilai nominal Rp 70 per saham dengan harga pelaksanaan Rp 88 per saham, yang dapat dilaksanakan mulai 7 Februari 2011 sampai dengan 26 Juli 2013. Jumlah Waran Seri I yang diterbitkan berjumlah 1.695.300.000, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 149.186.400.000. Pada tahun 2012, 4.044.336 saham Seri B telah diterbitkan dan disetor penuh sehubungan dengan Waran Seri I. Sampai dengan berakhirnya masa pelaksanaan Waran Seri I tanggal 26 Juli 2013, jumlah pelaksanaan Waran Seri I sebanyak 1.694.886.165 saham Seri B telah diterbitkan dan disetor penuh. Sisa jumlah Waran Seri I yang tidak dilaksanakan adalah sebanyak 413.835 saham Seri B.

Pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016, seluruh saham Perusahaan sejumlah 15.235.671.879 saham, telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

c. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Karyawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi serta Komite Audit Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	:	Satrio
Komisaris Independen	:	David Emlyn Parry
Komisaris Independen	:	Junianto Tri Priyono

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
PERIODE 6 BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. U M U M (Lanjutan)

c. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Karyawan (Lanjutan)

Direktur Utama	:	Muhammad Ramdani Basri
Direktur	:	Omar Danni Hasan
Direktur	:	John Scott Younger
Direktur	:	Ridwan A.C. Irawan
Ketua Komite Audit	:	David Emilyn Parry
Anggota Komite Audit	:	Tavip Santoso
Anggota Komite Audit	:	Tufrida Murniati Hasyim

Pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016, jumlah keseluruhan karyawan tetap yang dimiliki oleh Perusahaan dan Entitas Anaknya masing-masing adalah sebanyak 258 dan 259 orang.

d. Entitas-Entitas Anak yang Dikonsolidasi

Selanjutnya Perusahaan dan Entitas Anaknya disebut sebagai “Kelompok Usaha”.

Perusahaan memiliki kepemilikan langsung dan tidak langsung pada entitas-entitas anak berikut ini:

Entitas Anak	Kegiatan usaha	Tempat kedudukan	Tahun Awal kegiatan komersial	Persentase kepemilikan		Jumlah aset sebelum eliminasi (dalam jutaan Rupiah)	
				2017	2016	2017	2016
<u>Pemilikan Langsung :</u>							
PT Telekom Infranasantara (Telekom)	Perdagangan, perlengkapan dan telekomunikasi lain	Jakarta	2014	99,99%	99,99%	2.617.268	2.485.553
PT Margautama Nusantara (MUN)	Pembangunan, perdagangan dan jasa	Jakarta	2011	74,98%	74,98%	1.771.057	1.748.238
PT Potum Mundi Infranasantara (Potum)	Jasa pengelolaan air bersih dan limbah	Jakarta	2012	99,99%	99,99%	528.081	524.358
PT Energi Infranasantara (EI)	Pembangunan, perdagangan dan jasa	Jakarta	2013	99,99%	99,99%	316.823	315.004
PT Portco Infranasantara (Portco)	Manajemen pelabuhan	Jakarta	2012	99,99%	99,99%	298.112	291.667
<u>Pemilikan Tidak Langsung :</u>							
PT Komet Infra Nusantara (KIN) (melalui Telekom)	Jasa bidang telekomunikasi	Jakarta	2009	79,64%	79,64%	2.358.843	2.228.572
PT Bosowa Marga Nusantara (BMN) (melalui MUN)	Pengelola jalan tol	Makassar	1998	73,88%	73,88%	895.381	886.546
PT Bintaro Serpong Damai (BSD) (melalui MUN)	Pengelola jalan tol	Tangerang	1999	66,68%	66,68%	753.645	797.229

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
PERIODE 6 BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. U M U M (Lanjutan)

d. Entitas-Entitas Anak yang Dikonsolidasi (Lanjutan)

Entitas Anak	Kegiatan usaha	Tempat kedudukan	Tahun Awal kegiatan komersial	Persentase kepemilikan saham		Jumlah aset sebelum eliminasi (dalam jutaan Rupiah)	
				2017	2016	2017	2016
<u>Pemilikan Tidak Langsung :</u> (Lanjutan)							
PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE) (melalui BMN dan MUN)	Pengelola jalan tol	Makassar	2008	73,43%	73,43%	701.134	723.573
PT Quattro International (Quattro) (melalui KIN dan Telekom)	Jasa bidang telekomunikasi	Jakarta	2009	79,64%	79,64%	260.540	249.303
PT Sarana Catur Tirta Kelola (SCTK) (melalui Potum)	Jasa pengelolaan air bersih	Serang	1997	64,99%	64,99%	193.040	185.478
PT Darmanusa Tritunggal (Darma) (melalui KIN dan Telekom)	Jasa bidang telekomunikasi	Jakarta	2015	79,68%	79,68%	131.452	129.447
PT Inpol Meka Energi (IME) (melalui EI)	Jasa penyediaan tenaga listrik	Jakarta	Belum beroperasi	54,64%	54,64%	92.607	93.554
PT Dain Celicani Cemerlang (DCC) (melalui Potum)	Jasa pengelolaan air bersih dan limbah	Medan	2014	50,99%	50,99%	88.464	84.919
PT Tirta Bangun Nusantara (TBN) (melalui Potum)	Jasa pengelolaan air bersih dan limbah	Jakarta	2013	50,99%	50,99%	34.589	24.562
PT Sarana Tirta Rezeki (STR) (melalui Potum dan SCTK)	Jasa pengelolaan air bersih	Serang	1997	52,00%	52,00%	32.695	32.163
PT Jasa Sarana Nusa Makmur (JSNM) (melalui Potum dan SCTK)	Jasa pengelolaan air bersih	Serang	2007	64,97%	64,97%	7.065	7.184
PT Global Telekomunikasi Prima (GTP) (melalui KIN dan Telekom)	Jasa bidang telekomunikasi	Jakarta	Belum beroperasi	79,64%	79,64%	4.947	3.869

Berikut merupakan aktivitas-aktivitas yang dilakukan entitas-entitas anak pemilikan langsung Perusahaan:

PT Potum Mundi Infranasantara (Potum)

Berdasarkan akta notaris No. 12 tanggal 22 Juni 2017 dari Dwi Yulianti, S.H., notaris di Jakarta, para pemegang saham Potum menyetujui untuk meningkatkan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor dari Rp 40.970.000.000 yang terdiri dari 40.970 saham menjadi Rp 186.770.000.000 yang terdiri dari 186.770 saham. Atas peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Potum tersebut diatas, Perusahaan telah melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp 145.800.000.000 atau setara dengan 145.800 saham dengan mengkonversi setoran modal dibayar dimuka. Akta tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0014951.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 21 Juli 2017.

Berdasarkan akta notaris No.30 tanggal 30 Desember 2016 dan dipertegas dengan akta notaris No. 14 tanggal 30 Januari 2017 dari Dwi Yulianti, S.H., notaris di Jakarta, SCTK, Entitas Anak Potum, melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp 24.000.000.000 atau setara dengan 24.000 saham yang dilaksanakan oleh Potum dan Ratna Dewi Panduwinata, pihak ketiga, dengan mengkonversi utang pemegang saham. Akta tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0093858 tanggal 28 Februari 2017.

PT Telekom Infranasantara (Telekom)

Pada tanggal 19 Desember 2016, KIN, Entitas Anak Telekom, mengakuisisi 674.999 saham Quattro, berdasarkan akta notaris No.09 tanggal 19 Desember 2016 dari Emmyra Fauzia Kariana, SH, M.Kn, notaris di Jakarta, untuk kepemilikan saham 99,99%.

Pada tanggal 28 November 2016, KIN, Entitas Anak Telekom, mengakuisisi 1.980 saham GTP, berdasarkan akta notaris No. 41 tanggal 28 November 2016 dari Emmyra Fauzia Kariana, SH, M.Kn., notaris di Jakarta, untuk kepemilikan saham 99,00%.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
PERIODE 6 BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. U M U M (Lanjutan)

d. Entitas-Entitas Anak yang Dikonsolidasi (Lanjutan)

Berdasarkan Surat Keputusan di Luar Rapat Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan KIN tanggal 30 Agustus 2016 yang diaktakan dengan akta notaris No. 67 tanggal 9 September 2016 dari Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn, notaris di Jakarta, menyetujui Telekom untuk melakukan penambahan setoran modal pada KIN sebesar Rp 187.000.000.000 melalui peningkatan modal dasar dan disetor sebanyak 262.602.355 saham senilai Rp 26.260.235.500 yang seluruhnya diambil bagian dan disetor oleh Telekom. Akta tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0087488 tanggal 7 Oktober 2016.

Berdasarkan Surat Keputusan Sirkuler di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Telekom tanggal 16 Agustus 2016 yang diaktakan dengan akta notaris No. 1 tanggal 1 September 2016 dari Karin Christiana Basoeki, SH., notaris di Jakarta, Telekom menyetujui melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp 70.000.000.000 atau setara dengan 70.000 saham baru yang telah disetor penuh oleh Perusahaan. Akta tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0079866 tanggal 14 September 2016.

Berdasarkan Akta No.10 tanggal 29 Juli 2016 dari notaris Karin Christiana Basoeki, SH., notaris di Jakarta, Telekom, Entitas Anak, telah menyelesaikan transaksi Jual Beli Bersyarat 205.037.731 saham KIN milik GMT, pihak ketiga, atau setara dengan 16,94% kepemilikan. Atas transaksi tersebut, kepemilikan Telekom di KIN meningkat menjadi 910.724.339 saham atau setara dengan 75,22% kepemilikan.

Berdasarkan Surat Keputusan Sirkuler di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Telekom tanggal 8 Juni 2016 yang diaktakan dengan akta notaris No.23 tanggal 17 Juni 2016 dari Karin Christiana Basoeki, SH., notaris di Jakarta, Telekom menyetujui melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp 146.000.000.000 atau setara dengan 146.000 saham baru yang telah disetor penuh oleh Perusahaan. Akta tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0059526 tanggal 20 Juni 2016.

PT Portco Infranasantara (Portco)

Berdasarkan akta notaris No. 13 tanggal 22 Juni 2017 dari Dwi Yulianti, S.H., notaris di Jakarta, para pemegang saham Portco menyetujui untuk meningkatkan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor dari Rp 100.000.000.000 yang terdiri dari 100.000 saham menjadi Rp 248.000.000.000 yang terdiri dari 248.000 saham. Atas peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Potum tersebut diatas, Perusahaan telah melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp 148.000.000.000 atau setara dengan 148.000 saham dengan mengkonversi setoran modal dibayar dimuka. Akta tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0155058 tanggal 21 Juli 2017.

PT Energi Infranasantara (EI)

Berdasarkan akta notaris No. 14 tanggal 22 Juni 2017 dari Dwi Yulianti, S.H., notaris di Jakarta, para pemegang saham EI menyetujui untuk meningkatkan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor dari Rp 53.732.000.000 yang terdiri dari 53.732 saham menjadi Rp 209.933.000.000 yang terdiri dari 209.933 saham. Atas peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Potum tersebut diatas, Perusahaan telah melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp 156.201.000.000 atau setara dengan 156.201 saham dengan mengkonversi setoran modal dibayar dimuka. Akta tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0014983.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 21 Juli 2017.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
PERIODE 6 BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Laporan keuangan konsolidasian telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK), dan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) Nomor VIII.G.7 yang merupakan lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No.KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

Laporan keuangan interim konsolidasian Kelompok Usaha disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2017.

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, disusun berdasarkan konsep harga perolehan dan dasar akrual, kecuali untuk beberapa akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengklasifikasikan arus kas sebagai aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Transaksi-transaksi yang termasuk dalam laporan keuangan konsolidasian pada tiap entitas diukur dengan mata uang lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi (mata uang fungsional). Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian Kelompok Usaha.

Perubahan atas PSAK dan ISAK yang berlaku Efektif pada tahun berjalan

Interpretasi dan amandemen standar berikut berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 1 (Revisi 2015), "Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan"
- ISAK 31, "Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13: Properti Investasi"

Amandemen standar berikut berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 69 (Revisi 2015), "Agrikultur"
- PSAK 16, "Aset Tetap tentang Agrikultur: Tanaman Produktif"

Kelompok Usaha sedang mengevaluasi dan belum menentukan dampak dari standar akuntansi

b. Dasar Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan laporan keuangan Perusahaan dan entitas yang dikendalikan oleh Perusahaan (entitas anak). Pengendalian dianggap ada apabila Perusahaan mempunyai hak untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional suatu entitas untuk memperoleh manfaat dari aktivitasnya.

Perusahaan juga menilai keberadaan pengendalian ketika Perusahaan tidak memiliki lebih dari 50% hak suara namun dapat mengatur kebijakan keuangan dan operasional secara *de-facto*. Pengendalian *de-facto* dapat timbul ketika jumlah hak suara yang dimiliki Perusahaan, secara relatif terhadap jumlah dan penyebaran pemilikan hak suara pemegang saham lain memberikan Perusahaan kemampuan untuk mengendalikan kebijakan keuangan dan operasi, serta kebijakan lainnya. Entitas anak dikonsolidasikan secara penuh sejak tanggal pengendalian dialihkan kepada Perusahaan dan tidak dikonsolidasikan sejak tanggal Perusahaan kehilangan pengendalian.

Kombinasi bisnis dihitung dengan menggunakan metode akuisisi pada tanggal akuisisi, yaitu tanggal pengendalian beralih kepada Entitas. Biaya perolehan termasuk nilai wajar imbalan kontinjensi pada tanggal akuisisi. Biaya terkait akuisisi dibebankan ketika terjadi. Aset, liabilitas dan liabilitas kontinjensi dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada awalnya sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi. Untuk setiap akuisisi, Perusahaan mengakui kepentingan nonpengendali pada pihak yang diakuisisi baik sebesar nilai wajar atau sebagian proporsional kepentingan nonpengendali atas aset neto pihak yang diakuisisi.

Imbalan yang dialihkan tidak termasuk jumlah yang terkait dengan penyelesaian pada hubungan yang sebelumnya ada. Jumlah tersebut, umumnya diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
PERIODE 6 BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

b. Dasar Konsolidasi (Lanjutan)

Semua imbalan kontinjensi diakui pada nilai wajar pada saat tanggal akuisisi. Apabila imbalan kontinjensi diklasifikasikan sebagai ekuitas, maka hal tersebut tidak diukur kembali dan penyelesaiannya dicatat di dalam ekuitas. Selain itu, perubahan berikutnya terhadap nilai wajar imbalan kontinjensi diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Entitas anak

Laporan keuangan entitas anak dimasukkan ke dalam laporan keuangan konsolidasian sejak tanggal pengendalian dimulai sampai dengan tanggal pengendalian dihentikan. Kebijakan akuntansi entitas anak diubah apabila dipandang perlu untuk menyelaraskan kebijakan akuntansi yang diadopsi oleh Entitas.

Kerugian yang terjadi pada kepentingan nonpengendali pada entitas anak dialokasikan kepada kepentingan nonpengendali bahkan apabila dialokasikan kepada kepentingan nonpengendali tersebut dapat menimbulkan saldo defisit. Kepentingan nonpengendali disajikan di dalam laporan keuangan konsolidasian pada bagian ekuitas, yang terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk. Setelah terjadi hilangnya pengendalian, Kelompok Usaha menghentikan pengakuan aset dan liabilitas entitas anak, semua kepentingan nonpengendali dan komponen ekuitas lainnya terkait dengan entitas anak. Segala surplus atau defisit yang timbul dari hilangnya pengendalian, diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Apabila Perusahaan masih memiliki bagian di dalam entitas anak sebelumnya, maka bagian tersebut diukur pada nilai wajar pada tanggal saat pengendalian dihentikan. Selanjutnya, bagian tersebut dicatat sebagai *investee* dengan ekuitas yang dihitung atau sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual bergantung pada besarnya pengaruh.

Investasi pada entitas asosiasi

Jika Perusahaan memiliki pengaruh signifikan (namun bukan mengendalikan) terhadap kebijakan keuangan dan kebijakan operasi suatu entitas, entitas tersebut diklasifikasikan sebagai entitas asosiasi. *Investee* dicatat dengan menggunakan metode ekuitas (*equity-accounted investees*) dan diakui sebesar harga perolehan pada saat awal perolehan. Perusahaan anaknya mengakui bagian dari laba dan rugi dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, kecuali jika kerugian melebihi investasi pada entitas asosiasi kecuali jika terdapat jaminan tertentu. Pengaruh signifikan diasumsikan terjadi ketika Kelompok Usaha memiliki antara 20% sampai dengan 50% hak suara entitas lain. Biaya investasi termasuk biaya transaksi.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari transaksi antara Kelompok Usaha dengan perusahaan asosiasi diakui hanya sebatas kepentingan investor terkait dalam asosiasi. Bagian keuntungan dan kerugian penanam modal yang timbul dari transaksi asosiasi itu dihilangkan terhadap nilai tercatat asosiasi.

Laporan keuangan konsolidasian mencakup bagian laba rugi Kelompok Usaha dan penghasilan komprehensif lain dari *investee* yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, setelah dilakukan penyesuaian untuk menyelaraskan kebijakan akuntansi *investee* yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas dengan kebijakan Kelompok Usaha, sejak tanggal dimulainya pengaruh signifikan sampai dengan pengaruh signifikan berakhir.

Transaksi yang dieliminasi pada konsolidasi

Saldo dan transaksi antar Kelompok Usaha dan semua pendapatan dan beban yang belum terealisasi yang timbul dari transaksi antar Kelompok Usaha, dieliminasi di dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian. Laba yang belum terealisasi yang timbul dari transaksi dengan entitas asosiasi, dieliminasi terhadap investasi dari bagian Kelompok Usaha di dalam *investee*. Kerugian yang belum terealisasi, dieliminasi dengan cara yang sama dengan keuntungan yang belum terealisasi, hanya apabila tidak terdapat bukti penurunan nilai.

Akuntansi bagi entitas anak, entitas asosiasi dan ventura bersama di dalam laporan keuangan tersendiri

Apabila Perusahaan menyajikan laporan keuangan tersendiri sebagai informasi tambahan yang dikonsolidasikan kepada laporan keuangan konsolidasian, maka investasi pada entitas anak, entitas asosiasi dan ventura bersama, disajikan di dalam laporan posisi keuangan Entitas senilai nilai tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Terhadap pelepasan investasi pada entitas anak dan entitas asosiasi, perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari investasi diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
PERIODE 6 BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

b. Dasar Konsolidasi (Lanjutan)

Transaksi dengan kepentingan nonpengendali

Transaksi dengan kepentingan nonpengendali dihitung sebagai transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan oleh karena itu tidak terdapat *goodwill* yang diakui sebagai hasil transaksi tersebut. Penyesuaian kepentingan nonpengendali berdasarkan jumlah proporsional aset bersih entitas anak.

Jika kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Kelompok Usaha:

- menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak;
- menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan nonpengendali;
- menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran, yang dicatat di ekuitas, bila ada;
- mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima
- mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;
- mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi; dan
- mereklasifikasi bagian induk atas komponen yang sebelumnya diakui sebagai penghasilan komprehensif ke laporan laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba.

c. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

- (a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - (ii) memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - (iii) personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
- (b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - (i) entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
 - (ii) satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - (iii) kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - (iv) satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - (v) entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca-kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
 - (vi) entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
 - (vii) orang yang diidentifikasi dalam huruf (a)(i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

d. Transaksi dan Penjabaran Mata Uang Asing

Transaksi-transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
PERIODE 6 BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

d. Transaksi dan Penjabaran Mata Uang Asing (Lanjutan)

Kurs yang digunakan untuk menjabarkan aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing adalah Rp 13.319 dan 13.436 per 1 Dolar Amerika Serikat (USD).

e. Kas dan Setara Kas

Kas terdiri dari kas dan bank. Setara kas adalah semua investasi yang bersifat jangka pendek dan sangat likuid yang dapat segera dikonversikan menjadi kas penuh dengan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya, dan yang tidak dijaminakan serta tidak dibatasi penggunaannya.

Kas dan setara kas yang ditempatkan pada rekening penampungan (*escrow account*) selama periode tertentu, sesuai dengan persyaratan restrukturisasi utang bank, disajikan sebagai "Bank yang Dibatasi Penggunaannya".

f. Piutang Usaha dan Non-usaha

Piutang usaha merupakan jumlah yang terutang dari pelanggan atas penjualan barang atau jasa dalam kegiatan usaha normal. Jika piutang diperkirakan dapat ditagih dalam waktu satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi normal jika lebih panjang), piutang usaha diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang usaha disajikan sebagai aset tidak lancar.

Piutang usaha dan non-usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif, kecuali efek diskontonya tidak material, setelah dikurangi provisi untuk penurunan nilai piutang.

Kolektibilitas piutang usaha dan piutang non-usaha ditinjau secara berkala. Piutang yang diketahui tidak tertagih, dihapuskan dengan secara langsung mengurangi nilai tercatatnya. Akun penyisihan digunakan ketika terdapat bukti objektif bahwa Perusahaan tidak dapat menagih seluruh nilai piutang sesuai dengan persyaratan awal piutang. Jumlah penurunan nilai adalah sebesar selisih antara nilai tercatat aset dan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan pada tingkat suku bunga efektif awal. Arus kas terkait piutang jangka pendek tidak didiskontokan apabila efek diskonto tidak material.

g. Transaksi Reverse-Repo

Investasi jangka pendek Kelompok Usaha dalam bentuk efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*) diakui sebesar harga jual kembali efek yang bersangkutan dikurangi pendapatan bunga yang belum diamortisasi. Selisih antara harga beli dengan harga jual diperlakukan sebagai pendapatan bunga yang belum diamortisasi dan diakui sebagai pendapatan bunga sesuai dengan jangka waktu efek dibeli hingga dijual kembali dengan menggunakan metode suku bunga efektif (*effective interest rate*).

h. Beban Dibayar di Muka

Beban dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

i. Persediaan

Nilai awal persediaan diakui sebesar biaya perolehan, dan selanjutnya ditentukan sebesar nilai terendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi bersih. Biaya perolehan terdiri dari biaya pembelian, dan biaya-biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
PERIODE 6 BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

i. Persediaan (Lanjutan)

Nilai realisasi bersih adalah taksiran harga jual dalam kegiatan usaha normal setelah dikurangi dengan taksiran biaya penyelesaian dan taksiran biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penjualan.

Cadangan kerugian penurunan nilai untuk persediaan usang dan yang perputarannya lambat ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan atau harga jual masing-masing persediaan dimaksud di masa yang akan datang.

j. Aset Tetap

Pemilikan Langsung

Aset tetap, kecuali tanah, dinyatakan berdasarkan biaya perolehan, tetapi tidak termasuk biaya perawatan sehari-hari, dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada. Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan.

Beban-beban yang timbul setelah aset tetap digunakan untuk operasi, seperti beban perbaikan dan pemeliharaan, dibebankan ke laba rugi pada saat terjadinya. Apabila beban-beban tersebut dengan jelas menimbulkan peningkatan manfaat ekonomis di masa datang dari penggunaan aset tetap tersebut yang dapat melebihi kinerja normalnya, maka beban-beban tersebut dikapitalisasi sebagai tambahan biaya perolehan aset tetap.

Penyusutan aset tetap, kecuali tanah, dihitung berdasarkan metode garis lurus selama masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Masa manfaat (tahun)
Bangunan dan prasarana	20
Mesin dan peralatan	5
Peralatan kantor	4 - 5
Kendaraan	5

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya (*derecognized*) pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Aset tetap yang dijual atau dilepaskan, dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutan serta akumulasi penurunan nilai yang terkait dengan aset tetap tersebut. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap ditentukan sebesar perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan, jika ada, dengan jumlah tercatat dari aset tetap tersebut, dan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada tahun terjadinya penghentian pengakuan.

Nilai tercatat aset tetap, umur manfaat, serta metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan dilakukan penyesuaian apabila hasil telaah berbeda dengan estimasi sebelumnya.

Aset dalam Penyelesaian

Aset dalam penyelesaian dinyatakan berdasarkan biaya perolehan termasuk biaya perolehan tanah dan akumulasi biaya pembangunan. Pada saat pembangunan tersebut selesai dan siap untuk digunakan, jumlah biaya yang terjadi diklasifikasikan ke akun "Aset Tetap" atau "Properti Investasi" sesuai peruntukannya.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
PERIODE 6 BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

k. Properti Investasi

Properti investasi adalah tanah atau bangunan (termasuk menara) atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya yang dikuasai oleh Kelompok Usaha untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak digunakan maupun dijual dalam kegiatan operasi.

Properti investasi diukur pada nilai wajar. Nilai wajar properti investasi diakui berdasarkan penilaian dari penilai independen yang memenuhi kualifikasi dan telah diakui, serta didukung oleh bukti pasar. Perubahan nilai wajar properti investasi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Properti investasi dihentikan pengakuannya (dikeluarkan dari laporan posisi keuangan konsolidasian) pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang diharapkan pada saat pelepasannya. Laba rugi yang timbul dari penghentian dan pelepasan properti investasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dalam tahun terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

Transfer ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik, dimulainya sewa operasi ke pihak lain atau berakhirnya konstruksi atau pengembangan. Transfer dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik atau dimulainya pengembangan untuk dijual.

l. Sewa

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Sewa lainnya, yang tidak memenuhi kriteria tersebut, diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Sebagai Lessor

Dalam sewa pembiayaan, *lessor* mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan sebesar jumlah investasi sewa neto oleh Kelompok Usaha. Pengakuan penghasilan sewa pembiayaan dialokasikan pada periode akuntansi yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi bersih *lessor*.

Pendapatan sewa dari operasi diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa. Biaya langsung awal yang terjadi dalam proses negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan dalam jumlah tercatat aset sewaan dan diakui dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Sebagai Lessee

Aset pada sewa pembiayaan dicatat pada awal masa sewa sebesar nilai wajar aset sewaan Kelompok usaha yang ditentukan pada awal kontrak atau, jika lebih rendah, sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Liabilitas kepada *lessor* disajikan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai liabilitas sewa pembiayaan.

Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Sewa kontinjen diakui sebagai beban di dalam periode terjadinya.

Dalam hal insentif diperoleh dalam sewa operasi, insentif tersebut diakui sebagai liabilitas. Keseluruhan manfaat dari insentif diakui sebagai pengurangan dari biaya sewa dengan dasar garis lurus kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat yang dinikmati pengguna.

m. Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset Keuangan

Aset keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang, (iii) aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo, dan (iv) aset keuangan tersedia untuk dijual.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
PERIODE 6 BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

m. Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset Keuangan (Lanjutan)

Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

(i) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah aset keuangan yang diperdagangkan. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diperdagangkan jika perolehannya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti adanya kecenderungan ambil untung dalam jangka pendek.

Kelompok Usaha tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

(ii) Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif.

Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah nilai transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Kelompok Usaha memiliki pinjaman yang diberikan dan piutang meliputi kas dan setara kas, piutang usaha dan non-usaha, uang muka dan piutang investasi, dan piutang atas perjanjian konsesi jasa.

(iii) Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo

Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta manajemen mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, kecuali:

- a. investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
- b. investasi yang ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan
- c. investasi yang memiliki definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

Kelompok Usaha tidak memiliki aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo.

(iv) Aset keuangan tersedia untuk dijual

Aset keuangan tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan dalam tiga kategori sebelumnya.

Setelah pengukuran awal, aset keuangan tersedia untuk dijual diukur dengan nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi diakui dalam ekuitas sampai investasi tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas akan direklasifikasi ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Kelompok Usaha memiliki aset keuangan tersedia untuk dijual (Catatan 5).

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
PERIODE 6 BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

m. Aset dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

Aset Keuangan (Lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan

Aset keuangan dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Bukti objektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- (i) kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- (ii) pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- (iii) terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

Penghentian pengakuan aset keuangan

Kelompok Usaha menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Kelompok Usaha mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain.

Jika Kelompok Usaha tidak mengalihkan serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Kelompok Usaha mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Kelompok Usaha memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Kelompok Usaha masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dikelompokkan ke dalam kategori (i) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

(i) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah liabilitas keuangan yang diperdagangkan.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diperdagangkan jika perolehannya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti adanya kecenderungan ambil untung dalam jangka pendek. Utang derivatif dikategorikan sebagai liabilitas keuangan yang diperdagangkan kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Kelompok Usaha tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

(ii) Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diklasifikasikan dalam kategori ini dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Kelompok Usaha memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi meliputi utang usaha, utang non-usaha, utang pembiayaan konsumen, beban akrual, utang bank dan pinjaman jangka panjang.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
PERIODE 6 BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

n. Perjanjian Jasa konsesi

Pendapatan

Pendapatan yang berasal dari jasa konstruksi atau peningkatan kemampuan berdasarkan perjanjian jasa konsesi diakui berdasarkan persentase penyelesaian dari pekerjaan yang dilakukan, konsisten dengan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha dalam mengakui pendapatan atas jasa konstruksi. Pendapatan operasi atau jasa diakui pada periode dimana jasa telah diberikan oleh Kelompok Usaha.

Aset keuangan non-derivatif

Kelompok Usaha mengakui aset keuangan yang terjadi akibat adanya perjanjian konsesi jasa ketika memiliki hak kontraktual tanpa syarat untuk menerima kas atau aset keuangan lain dari atau atas diskresi pemberi konsesi untuk jasa konstruksi atau peningkatan kemampuan.

Pada pengakuan awalnya, aset keuangan tersebut diukur pada nilai wajarnya dan diklasifikasikan sebagai pinjaman dan piutang. Pengakuan setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut diakui pada biaya perolehan diamortisasi.

Aset takberwujud

Kelompok Usaha mengakui aset takberwujud yang berasal dari perjanjian jasa konsesi sejauh menerima hak untuk membebankan pengguna sarana konsesi. Aset takberwujud yang diperoleh dari penyediaan jasa konstruksi atau peningkatan kemampuan dalam perjanjian jasa konsesi diukur pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal.

Pengakuan setelah pengakuan awal, aset takberwujud diukur pada nilai perolehannya, termasuk kapitalisasi biaya pinjaman, dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi penurunan nilai.

Estimasi umur manfaat dari aset takberwujud pada perjanjian jasa konsesi adalah periode ketika Kelompok Usaha mampu membebankan kepada pengguna jasa publik atas pemanfaatan sarananya hingga berakhirnya masa konsesi.

Jenis	Tahun
Hak Pengusahaan Jalan Tol	
Ruas Tallo - Bandara Hasanuddin	35 *)
Ruas Pelabuhan Soekarno Hatta-Pettarani	30 *)
Ruas Pondok Ranji and Pondok Aren	28
Hak Pengusahaan Pengolahan Air Bersih	30
*) maksimum	

Beban pemeliharaan dan perbaikan

Beban pemeliharaan dan perbaikan sehubungan dengan perjanjian konsesi jasa dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat terjadinya, kecuali jika besar kemungkinan akan meningkatkan manfaat ekonomi di masa depan dan dapat diukur secara handal.

o. Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan

Pada tanggal pelaporan, Kelompok Usaha menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai. Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individu, Kelompok Usaha mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas aset.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
PERIODE 6 BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

o. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan (Lanjutan)

Perkiraan jumlah yang dapat diperoleh kembali adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau nilai pakai. Jika jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laba rugi.

Goodwill diuji penurunan nilai setiap tahun dan ketika terdapat suatu indikasi bahwa nilai tercatatnya mungkin mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai bagi *goodwill* ditetapkan dengan menentukan jumlah tercatat tiap Unit Penghasil Kas (UPK) terkait dengan *goodwill* tersebut. Jika jumlah terpulihkan UPK kurang dari jumlah tercatatnya, rugi penurunan nilai diakui. Rugi penurunan nilai terkait *goodwill* tidak dapat dibalik pada periode berikutnya.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi atas kemungkinan penurunan potensial atas nilai aset non-keuangan pada tanggal laporan keuangan.

p. Pinjaman

Pinjaman merupakan dana yang diterima dari bank atau pihak lain dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

Pinjaman yang diterima diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan pinjaman dikurangkan dari jumlah pinjaman yang diterima. Lihat Catatan 2n untuk kebijakan akuntansi atas liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

q. Provisi

Provisi diakui ketika Kelompok Usaha memiliki kewajiban legal maupun konstruktif sebagai hasil peristiwa lalu, yaitu kemungkinan besar arus keluar sumber daya ekonomi diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dan suatu estimasi terhadap jumlah dapat dilakukan.

Provisi dikaji pada akhir tiap periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik. Apabila tidak ada lagi kemungkinan arus keluar sumber daya ekonomi diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban, maka provisi tersebut dicadangkan.

Apabila dampak nilai waktu uang adalah material, maka provisi didiskontokan dengan menggunakan tarif sebelum pajak, jika lebih tepat, untuk mencerminkan risiko spesifik liabilitas.

Kenaikan provisi terkait dengan berlalunya waktu diakui sebagai beban keuangan, ketika pendiskontoan digunakan.

Provisi pemeliharaan jalan tol

Dalam pengoperasian jalan tol, Perusahaan mempunyai kewajiban untuk menjaga standar kualitas jalan tol sesuai dengan SPM (Standar Pelayanan Minimum) yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, yaitu dengan melakukan pelapisan ulang jalan tol secara berkala akan diprovisi berdasarkan estimasi seiring dengan penggunaan jalan tol oleh pelanggan. Provisi diukur dengan nilai kini atas estimasi manajemen terhadap pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan liabilitas ini pada tanggal pelaporan.

r. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan konstruksi

Kelompok Usaha mengakui aset takberwujud atas jasa konstruksi dan peningkatan kemampuan dimana Kelompok Usaha menerima hak (lisensi) untuk membebaskan pengguna jasa publik. Suatu hak untuk membebaskan pengguna jasa publik bukan merupakan hak tanpa syarat untuk menerima kas karena jumlahnya bergantung pada sejauh mana publik menggunakan jasa. Pada fase konstruksi, Kelompok Usaha mencatat aset takberwujud dan mengakui pendapatan dan biaya konstruksi sesuai dengan basis kontrak biaya-plus.

Pendapatan konstruksi dicatat bersamaan dengan pengakuan aset takberwujud pada tahap konstruksi.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
PERIODE 6 BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

r. Pengakuan Pendapatan dan Beban (Lanjutan)

Pendapatan tol dari hasil pengoperasian jalan tol diakui pada saat penjualan karcis tol dan/atau jasa telah diberikan. Pendapatan tol dari hasil kerjasama pengoperasian jalan tol dengan investor dengan kuasa penyelenggaraan diakui pada saat penjualan karcis tol setelah dikurangi bagian investor tersebut. Pembayaran kepada investor tanpa hak operasi dicatat sebagai angsuran wajib kerja sama operasi. Selisih total pembayaran atas angsuran wajib kerjasama operasi dicatat sebagai gabungan beban usaha atau pendapatan.

Pendapatan sewa

Pendapatan sewa properti investasi diakui selama masa sewa, pendapatan sewa properti investasi diterima di muka disajikan sebagai akun "Pendapatan diterima di muka". Pendapatan sewa properti investasi yang belum ditagih disajikan sebagai akun "Piutang Usaha" di laporan posisi keuangan konsolidasian.

Penjualan air bersih

Pendapatan dari penjualan penyediaan air bersih diakui berdasarkan volume yang diserahkan kepada pelanggan, baik yang secara khusus dibaca dan ditagih maupun yang diestimasi berdasarkan *output* dari jaringan penyediaan air bersih dan kemungkinan besar Kelompok Usaha akan menerima pembayaran yang telah disepakati sebelumnya.

Pendapatan usaha lainnya

Pendapatan sewa iklan, lahan dan tempat peristirahatan serta pendapatan jasa pengoperasian diakui sesuai periode yang sudah berjalan dalam tahun yang bersangkutan. Pendapatan diterima di muka untuk periode yang belum berjalan diakui sebagai pendapatan diterima di muka dan disajikan di laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai liabilitas.

Pendapatan dividen dari aset keuangan lainnya diakui pada saat pembagian dividen diumumkan. Pendapatan lainnya diakui atas dasar akrual.

Beban konstruksi

Beban konstruksi merupakan seluruh biaya konstruksi pembangunan jalan tol dan pembangunan sarana pengelolaan air bersih. Konstruksi pembangunan jalan tol termasuk peningkatan kapasitas jalan tol yang meliputi pengadaan tanah, studi kelayakan dan biaya-biaya lain yang berhubungan langsung dengan pembangunan jalan tol, termasuk biaya pembangunan jalan akses ke jalan tol, jalan alternatif dan fasilitas jalan umum yang disyaratkan ditambah biaya pinjaman lain yang secara langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset tersebut. Biaya pinjaman dikapitalisasi sampai dengan saat proses pembangunan tersebut selesai dan dioperasikan.

Beban konstruksi dicatat bersamaan dengan pengakuan aset takberwujud pada tahap konstruksi.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (*accrual basis*).

s. Perpajakan

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak dan undang-undang pajak yang berlaku pada tanggal pelaporan. Aset dan liabilitas pajak kini diukur sebesar nilai yang diharapkan dapat terpulihkan atau dibayar.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
PERIODE 6 BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

s. Perpajakan (Lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan konsolidasian dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa mendatang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan kecuali pajak tangguhan yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Pajak Final

Peraturan pajak di Indonesia mengatur beberapa jenis penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final. Pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Mengacu pada revisi PSAK 46, pajak final tersebut tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK 46. Oleh karena itu, Kelompok Usaha meyakinkan beban pajak final sehubungan dengan penghasilan yang menjadi obyek pajak final sebagai bagian dari beban usaha.

t. Imbalan Pasca-kerja

Kelompok Usaha mengakui imbalan kerja jangka pendek berdasarkan metode akrual sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003.

Liabilitas imbalan pasca-kerja dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*.

Biaya jasa lalu yang timbul dari amandemen atau kurtailmen program diakui sebagai beban dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan pasti di laporan posisi keuangan konsolidasian merupakan nilai kini liabilitas imbalan pasti disesuaikan dengan keuntungan dan kerugian aktuarial yang belum diakui dan biaya jasa lalu yang belum diakui.

Pengukuran kembali yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui penghasilan komprehensif lain.

Keuntungan dan kerugian dari kurtailmen atau penyelesaian kewajiban imbalan pasti diakui ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

u. Laba per Saham Dasar

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar selama tahun berjalan.

Kelompok Usaha tidak mempunyai efek berpotensi saham biasa yang bersifat *dilutive* pada tanggal-tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016, dan oleh karenanya, laba per saham dilusi tidak dihitung dan disajikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
PERIODE 6 BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

v. Instrumen Keuangan Derivatif

Entitas anak melakukan transaksi derivatif untuk tujuan mengelola risiko perubahan nilai tukar mata uang asing yang berasal dari pinjaman jangka panjang dalam mata uang asing.

Kelompok Usaha menerapkan PSAK 55, “Instrumen Keuangan Pengakuan dan Pengukuran” yang mengatur standar akuntansi dan pelaporan untuk transaksi derivatif dan aktivitas lindung nilai, yang mengharuskan setiap instrumen derivatif (termasuk instrument derivatif melekat) diakui sebagai aset atau liabilitas berdasarkan nilai wajar setiap kontrak. Nilai wajar merupakan perhitungan nilai kini (*present value*) dengan menggunakan data dan asumsi yang berlaku umum.

Berdasarkan kriteria khusus untuk akuntansi lindung nilai pada PSAK 55, semua instrumen derivatif yang ada pada entitas anak tidak memenuhi persyaratan tersebut dan oleh karena itu tidak dikategorikan sebagai lindung nilai yang efektif untuk tujuan akuntansi. Perubahan atas nilai wajar instrument derivatif dibebankan atau dikreditkan pada laba rugi tahun berjalan.

Perubahan nilai wajar instrumen derivatif dan laba (rugi) dari penyelesaian kontrak derivatif dibebankan atau dikreditkan pada akun “Laba (rugi) perubahan nilai wajar derivatif - Neto” pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

w. Informasi Segmen

Segmen adalah bagian khusus Kelompok Usaha yang terlibat baik dalam menyediakan produk dan jasa (segmen usaha) maupun dalam menyediakan produk dan jasa dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis) yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk item-item yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta item-item yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai dengan segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar perusahaan dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontijensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Kelompok Usaha mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Kelompok Usaha. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Penyusutan Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai 20 tahun.

Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Kelompok Usaha menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Nilai tercatat bersih atas aset tetap Kelompok Usaha pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 diungkapkan dalam Catatan 14.

PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
PERIODE 6 BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (Lanjutan)

Aset takberwujud

Nilai wajar dari perolehan aset takberwujud atas penyediaan jasa konstruksi pada perjanjian jasa konsesi diestimasi berdasarkan referensi nilai wajar dari pengadaan jasa konstruksi tersebut. Nilai wajar yang diperhitungkan sebagai estimasi dari pendekatan biaya (*cost plus*) dengan margin keuntungan sebesar 10%, yang dianggap cukup memadai oleh Kelompok Usaha. Ketika Kelompok Usaha menerima aset takberwujud dan aset keuangan yang berasal dari jasa konstruksi dalam perjanjian jasa konsesi, Kelompok Usaha mengestimasi nilai wajar dari aset takberwujud sebesar perbedaan nilai antara nilai wajar dari jasa konstruksi dan nilai wajar dari aset keuangan yang diterima. Nilai tercatat aset takberwujud diungkapkan pada Catatan 15 atas laporan keuangan konsolidasian.

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Kelompok Usaha menggunakan penilaian mereka untuk memilih berbagai metode dan membuat asumsi yang terutama didasarkan pada kondisi pasar yang ada pada setiap tanggal laporan posisi keuangan tanggal. Kelompok Usaha telah menggunakan analisis *discounted cash flow* untuk berbagai aset keuangan dan liabilitas yang tidak diperdagangkan di pasar aktif. Perbandingan antara nilai wajar dan nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan Kelompok Usaha pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian diungkapkan dalam Catatan 40.

Imbalan Pasca-kerja

Penentuan liabilitas imbalan pasca-kerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto dan kenaikan gaji. Realisasi yang berbeda dari asumsi Kelompok Usaha diakumulasi dan diamortisasi selama periode mendatang dan akibatnya akan berpengaruh terhadap jumlah liabilitas yang diakui dimasa mendatang.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Kelompok Usaha mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
PERIODE 6 BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. KAS DAN SETARA KAS

	2 0 1 7	2 0 1 6
Kas - Rupiah	2.703.326.884	2.772.910.142
B a n k		
Rupiah		
PT Bank Central Asia Tbk	32.355.460.567	32.334.823.134
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	28.017.513.436	4.607.528.744
PT Bank Victoria International Tbk	6.999.679.298	6.742.598.320
PT Bank Bukopin Tbk	6.084.323.838	1.919.852.577
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Jakarta	5.206.531.308	5.365.782.615
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	4.633.224.628	1.873.835.897
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	1.407.350.755	10.968.947.394
PT Bank ICBC Indonesia	1.019.986.908	1.688.656.778
PT Bank Commonwealth	1.016.451.770	2.992.258.439
PT Bank Pan Indonesia Tbk	617.415.149	280.603.398
Citibank, N.A.	502.527.869	502.563.869
PT Bank OCBC NISP Tbk	325.410.376	4.360.084.556
PT Bank MNC International Tbk	312.948.584	1.415.484.845
PT Bank Permata Tbk	252.322.527	252.154.609
PT Bank Mayapada International Tbk	190.019.032	1.049.578.107
PT Bank Mega Tbk	132.156.543	219.358.436
PT Bank Ganesha Tbk	114.688.584	108.631.577
PT Bank Maybank Syariah Indonesia	113.597.075	222.767.310
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	48.673.105	48.133.667
PT Bank UOB Indonesia	45.786.184	45.786.184
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	42.966.412	10.528.019
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	41.550.876	2.009.294.724
PT Bank Muallamat Tbk	25.587.945	51.323.872
PT Bank CIMB Niaga Tbk	17.009.633	17.480.632
PT Bank China Construction (dahulu PT Bank Windu International Tbk)	1.843.566	4.868.089
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	920.896	980.896
PT Bank DKI	973.000	973.000
Standard Chartered Bank	-	179.158.791
	89.526.919.864	79.274.038.479
Dolar Amerika Serikat		
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Jakarta	16.654.983.291	32.100.254.613
PT Bank Central Asia Tbk	86.213.887	87.777.388
PT Bank ICBC Indonesia	26.501.754	27.018.882
PT Bank Pan Indonesia Tbk	14.933.341	15.728.826
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.247.448	2.771.041
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-	413.721
PT Bank Mega Tbk	-	29.152.492
PT Bank OCBC NISP Tbk	-	11.396.012
PT Bank MNC International Tbk	-	76.854
	16.784.879.721	32.274.589.829
Jumlah Bank	106.311.799.585	111.548.628.308
Deposito berjangka - Rupiah		
PT Bank Pan Indonesia Tbk	200.000.000.000	200.000.000.000
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	100.000.000.000	100.000.000.000
PT Bank Victoria International Tbk	98.000.000.000	130.000.000.000
PT Bank Central Asia Tbk	18.500.000.000	60.000.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	1.800.000.000	5.000.000.000
PT Bank Ganesha Tbk	-	5.000.000.000
Standard Chartered Bank	-	10.000.000.000
Jumlah Deposito berjangka	418.300.000.000	510.000.000.000
Jumlah	527.315.126.469	624.321.538.450

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
PERIODE 6 BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

4. KAS DAN SETARA KAS (Lanjutan)

Tingkat bunga deposito berjangka pada tahun 2017 dan 2016 masing-masing berkisar antara 3,75% - 10,00% dan 4,00% - 10,00% per tahun. Deposito berjangka termasuk kelompok "Kas dan setara kas" dengan jangka waktu penempatan tiga bulan atau kurang.

5. ASET KEUANGAN YANG TERSEDIA UNTUK DIJUAL

Pada tanggal 17 Februari 2017, PT Marga Utama Nusantara (MUN), entitas anak, mengadakan perjanjian pengelolaan dana investasi dengan PT Pratama Capital Asset Manajemen (Pratama). Dana kelolaan yang disyaratkan oleh MUN adalah investasi dalam bentuk surat berharga pasar uang dan atau pasar modal.

Pada tanggal 30 Juni 2017, dana MUN yang dikelola oleh Pratama adalah sebesar Rp 60.000.000.000 yang diinvestasikan dalam bentuk kepemilikan saham pada perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Penyesuaian atas nilai wajar investasi sampai dengan periode 6 bulan yang berakhir 30 Juni 2017 sebesar Rp 5.058.880.000 dicatat sebagai "Laba Komprehensif Lainnya".

Investasi digolongkan sebagai aset keuangan yang tersedia untuk dijual dengan nilai efek ditetapkan berdasarkan kuotasi harga pasar pada Bursa Efek Indonesia.

Seluruh investasi merupakan investasi pihak ketiga dan tidak dijamin.

6. INVESTASI JANGKA PENDEK

Investasi jangka pendek Kelompok Usaha dalam bentuk efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*) pada 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Pihak	Jenis efek	Nilai nominal	Tanggal penempatan	Tanggal jatuh tempo	Nilai penjualan kembali	Pendapatan bunga yang belum diamortisasi		Nilai tercatat	
						2017	2016	2017	2016
PT Mandiri Makmur Persada	Saham	44.000.000.000	18/03/2017	18/06/2017	45.760.000.000	(1.527.912.088)	(1.527.912.088)	44.232.087.912	44.232.087.912
PT Mulia Sukses Persada	Saham	56.000.000.000	18/03/2017	18/06/2017	58.240.000.000	(1.944.615.385)	(1.944.615.385)	56.295.384.615	56.295.384.615
PT Permata Perdana Sakti	Saham	20.000.000.000	28/04/2017	28/04/2018	20.000.000.000	(387.744.920)	(387.744.920)	19.612.255.080	19.612.255.080
PT Permata Perdana Sakti	Saham	15.000.000.000	29/04/2017	29/04/2018	15.000.000.000	(52.055.092)	(52.055.092)	14.947.944.908	14.947.944.908
PT Permata Perdana Sakti	Saham	15.000.000.000	25/05/2017	25/05/2018	15.000.000.000	(65.068.865)	(65.068.865)	14.934.931.135	14.934.931.135
Jumlah		150.000.000.000			154.000.000.000	(3.977.396.350)	(3.977.396.350)	150.022.603.650	150.022.603.650

Transaksi ini dijamin dengan efek yang dibeli tersebut, dimana kedua pihak melakukan peninjauan terhadap harga pasar efek yang dijamin atas kemungkinan penambahan atau pengurangan jaminan.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat peristiwa atau keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai, sehingga tidak dibuat cadangan kerugian penurunan nilai atas investasi tersebut.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
PERIODE 6 BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

7. PIUTANG USAHA

Berdasarkan pelanggan

	<u>2 0 1 7</u>	<u>2 0 1 6</u>
Pihak ketiga		
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	43.122.392.285	38.543.959.834
PT XL Axiata Tbk	19.501.644.866	17.431.097.316
PT Smartfren Telecom Tbk	6.582.890.118	5.883.965.125
PT Telekomunikasi Selular	3.064.381.387	2.739.026.915
Kartu tol prabayar	2.376.834.757	2.124.479.152
PT Indosat Tbk	1.509.385.018	1.349.129.129
PT Smart Telecom	1.264.795.806	1.130.508.679
PT Kawasan Industri Medan	973.342.683	870.000.000
PT Perusahaan Daerah Air Minum	786.275.295	702.794.112
PT Hutchison 3 Indonesia	555.690.724	496.691.390
PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk	379.268.011	339.000.000
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	374.047.202	334.333.500
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 200.000.000)	4.522.127.467	4.041.999.764
	85.013.075.620	75.986.984.916
Pihak berelasi (Catatan 35)	90.796.617	-
Bersih	<u>85.103.872.237</u>	<u>75.986.984.916</u>

Berdasarkan umur

	<u>2 0 1 7</u>	<u>2 0 1 6</u>
Belum jatuh tempo	55.944.673.564	49.951.511.659
1 - 30 hari	10.779.563.498	9.624.785.658
31 - 60 hari	4.996.083.619	4.460.870.236
Lebih dari 60 hari	13.383.551.556	11.949.817.364
Bersih	<u>85.103.872.237</u>	<u>75.986.984.916</u>

Seluruh piutang usaha dalam mata uang Rupiah, tidak dijamin dan tidak dikenakan bunga.

Berdasarkan telaah atas status dari masing-masing akun piutang usaha pada akhir tahun, manajemen Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai untuk piutang usaha telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang tersebut.

Kartu tol prabayar terdiri dari tagihan atas pendapatan tol BMN dan JTSE, Entitas Anak tidak langsung, dari e-toll Flazz BCA dan e-toll Mega Card pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016.

Manajemen juga berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan atas piutang usaha tersebut.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
PERIODE 6 BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

8. UANG MUKA DAN BEBAN DIBAYAR DI MUKA

	<u>2 0 1 7</u>	<u>2 0 1 6</u>
Uang muka		
Proyek	44.806.995.252	15.310.937.020
Pembelian aset tetap dan properti investasi	66.219.010.812	15.283.139.604
Jaminan	203.655.564	528.861.587
Lain-lain	10.308.326.328	19.856.211.146
Biaya dibayar di muka		
Sewa	168.968.046.855	154.281.683.513
Asuransi	2.796.797.555	1.834.696.687
Lain-lain	386.962.711	536.111.111
Jumlah	<u>293.689.795.077</u>	<u>207.631.640.668</u>
Bagian jangka panjang		
Uang muka pembelian aset tetap dan properti investasi jangka panjang	(14.012.513.698)	(15.283.139.604)
Sewa dibayar di muka jangka panjang	<u>(168.668.654.898)</u>	<u>(141.780.568.307)</u>
Bagian jangka pendek	<u>111.008.626.481</u>	<u>50.567.932.757</u>

Uang muka pembelian properti investasi merupakan uang muka yang dibayarkan KIN, Entitas Anak tidak langsung, atas pembelian properti investasi.

Sewa dibayar di muka adalah sewa lahan yang dibayarkan oleh KIN untuk properti investasi berupa menara telekomunikasi dengan jangka waktu sesuai dengan masa kontrak sewa dengan pelanggan (sekitar 1-12 tahun).

Uang muka proyek merupakan uang muka pekerjaan dalam pelaksanaan atas proyek:

	<u>2 0 1 7</u>	<u>2 0 1 6</u>
Menara telekomunikasi	14.914.847.127	62.871.329
Jalan tol	14.656.611.895	1.022.340.298
Pembangkit listrik tenaga mini-hidro	11.238.140.888	11.458.433.002
Pengelolaan air bersih	3.997.395.342	2.767.292.391
Jumlah	<u>44.806.995.252</u>	<u>15.310.937.020</u>

9. UANG MUKA INVESTASI DAN PIUTANG INVESTASI

	<u>2 0 1 7</u>	<u>2 0 1 6</u>
PT Menara Telekomunikasi Indonesia (MTI)	98.000.000.000	92.500.000.000
PT Andalan Karya Abadi (AKA)	83.905.410.107	83.905.410.107
PT Langgeng Sukses Mandiri (LSM)	81.527.520.203	75.898.908.158
Jumlah	<u>263.432.930.310</u>	<u>252.304.318.265</u>

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
PERIODE 6 BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

9. UANG MUKA INVESTASI DAN PIUTANG INVESTASI (Lanjutan)

Akun ini merupakan uang muka dan piutang investasi yang dapat dikonversi menjadi saham dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 21 Januari 2014, PT Telekom Infranasantara (Telekom), Entitas Anak, memberikan pinjaman Mudarabah Islamic Financing (MIF) 2 secara berangsur kepada MTI, pihak ketiga. Atas pinjaman ini, Telekom menerima *Call Option* dari MTI untuk dapat membeli saham KIN milik MTI sebanyak 138.314.575 saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 98.000.000.000. Sehubungan dengan *Call Option* tersebut, Telekom membayar imbalan kepada MTI sebesar Rp 1.000.000.000 dan juga menerbitkan *Put Option* kepada MTI.
- Pada tanggal 15 April 2013, Perusahaan memberikan pinjaman kepada AKA, pihak ketiga, dengan pinjaman maksimum sebesar Rp 100.000.000.000. Pinjaman ini ditujukan untuk kegiatan investasi dan dikenakan bunga 16% per tahun untuk jangka waktu 1 tahun. Perjanjian ini telah diubah berdasarkan addendum 1 Perjanjian Pinjaman pada tanggal 16 April 2014 tentang jangka waktu pinjaman menjadi 2 tahun sejak penarikan pertama pinjaman ini. Pinjaman ini telah diperpanjang pada tanggal 16 April 2016 sehingga akan berakhir pada 16 April 2020.
- Pada tanggal 13 Januari 2014, Perusahaan memberikan pinjaman kepada LSM yang digunakan untuk untuk kegiatan investasi dan modal kerja. Jangka waktu pinjaman adalah 12 (dua belas) bulan dan dikenakan tingkat bunga 11% per tahun. Pinjaman ini telah diperpanjang pada tanggal 28 Desember 2016 sehingga akan berakhir pada 28 Desember 2017.

10. PERSEDIAAN

Akun ini merupakan persediaan atas bahan-bahan untuk perbaikan, pemeliharaan dan penggantian menara telekomunikasi yang dimiliki oleh KIN, Entitas Anak tidak langsung.

Manajemen KIN berkeyakinan bahwa seluruh persediaan dapat digunakan atau dijual, sehingga tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai untuk persediaan usang.

11. BANK YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

	2017	2016
PT Bank Central Asia Tbk	22.145.015.939	26.008.808.025
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Jakarta	20.534.700.250	18.304.209.487
PT Bank Maybank Syariah Indonesia	2.242.000.000	2.242.000.000
Jumlah	44.921.716.189	46.555.017.512

Akun ini merupakan rekening *escrow* milik BSD, BMN, JTSE dan DCC, Entitas Anak tidak langsung, yang ditempatkan pada PT Bank Central Asia Tbk (BCA) sehubungan dengan pinjaman yang diperoleh Entitas Anak tidak langsung.

Rekening ini ditujukan untuk menampung pendapatan jalan tol harian serta penerimaan penjualan air bersih dan digunakan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian restrukturisasi pinjaman antara entitas-entitas anak tidak langsung dan BCA (Catatan 23).

IME, Entitas Anak tidak langsung, menempatkan *bank guarantee* pada PT Bank Maybank Syariah Indonesia sejak tanggal 18 Juni 2014 sebagai pelaksanaan pembayaran pembangkit listrik tenaga mini-hidro kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

KIN, Entitas Anak, menempatkan rekening *escrow* pada The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC), sejak tanggal 19 Oktober 2016 digunakan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian restrukturisasi pinjaman entitas anak.

PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
PERIODE 6 BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI

Penyertaan saham pada entitas asosiasi pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

	Jenis usaha	Persentase pemilikan	Saldo awal	Dividen	Bagian atas laba	Pengakuan atas bagian penghasilan komprehensif lain perusahaan asosiasi	Saldo akhir
Metode ekuitas							
PT Jakarta Lingkar Baratsatu	Pengelola jalan tol	25,00%	274.251.821.173	-	25.276.597.428	-	299.528.418.601
PT Intisentosa Alam Bahtera	Pengusahaan jasa pelabuhan	39,00%	70.024.408.122	-	3.676.016.545	-	73.700.424.667
PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri	Instalasi air bersih	28,00%	14.467.401.004	-	1.876.526.885	-	16.343.927.889
Jumlah			<u>358.743.630.299</u>	<u>-</u>	<u>30.829.140.858</u>	<u>-</u>	<u>389.572.771.157</u>

	Jenis usaha	Persentase pemilikan	Saldo awal	Dividen	Bagian atas laba	Pengakuan atas bagian penghasilan komprehensif lain perusahaan asosiasi	Saldo akhir
Metode ekuitas							
PT Jakarta Lingkar Baratsatu	Pengelola jalan tol	25,00%	266.876.731.069	-	7.208.209.297	166.880.807	274.251.821.173
PT Intisentosa Alam Bahtera	Pengusahaan jasa pelabuhan	39,00%	63.963.101.378	-	6.061.306.744	-	70.024.408.122
PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri	Instalasi air bersih	28,00%	14.477.337.852	(2.800.000.000)	2.789.663.743	399.409	14.467.401.004
Jumlah			<u>345.317.170.299</u>	<u>(2.800.000.000)</u>	<u>16.059.179.784</u>	<u>167.280.216</u>	<u>358.743.630.299</u>

13. PROPERTI INVESTASI - NILAI WAJAR

2017	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Entitas anak yang baru diakuisisi	Saldo akhir
Bangunan menara telekomunikasi						
Pemilikan langsung	1.382.376.857.691	-	-	-	-	1.382.376.857.691
Akumulasi perubahan nilai wajar	172.817.342.309	46.775.369.169	-	-	-	219.592.711.478
	<u>1.555.194.200.000</u>	<u>46.775.369.169</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.601.969.569.169</u>
Bangunan menara telekomunikasi dalam penyelesaian	36.285.505.489	15.932.789.104	-	-	-	52.218.294.593
Nilai Buku	<u>1.591.479.705.489</u>					<u>1.654.187.863.762</u>
2016	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Entitas anak yang baru diakuisisi	Saldo akhir
Bangunan menara telekomunikasi						
Pemilikan langsung	1.078.489.205.652	42.301.860.759	-	-	261.585.791.280	1.382.376.857.691
Akumulasi perubahan nilai wajar	119.607.794.348	53.209.547.961	-	-	-	172.817.342.309
	<u>1.198.097.000.000</u>	<u>95.511.408.720</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>261.585.791.280</u>	<u>1.555.194.200.000</u>
Bangunan menara telekomunikasi dalam penyelesaian	47.693.823.332	142.625.861.450	-	-	(154.034.179.293)	36.285.505.489
Nilai Buku	<u>1.245.790.823.332</u>					<u>1.591.479.705.489</u>

Properti investasi merupakan aset berupa menara telekomunikasi milik KIN dan Entitas Anaknya, Entitas Anak tidak langsung.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
PERIODE 6 BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

13. PROPERTI INVESTASI - NILAI WAJAR (Lanjutan)

Sehubungan dengan penerapan PSAK 13, "Properti Investasi", Kelompok Usaha telah memilih metode nilai wajar untuk pengukuran setelah pengakuan awal. Penilaian dari penilai independen telah sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK, dahulu Bapepam-LK) No. VIII.C.4 mengenai pedoman penilaian dan penyajian laporan penilaian properti di pasar modal. Laba atau rugi antara biaya historis dan nilai wajar diakui di dalam laporan konsolidasian laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Dalam menentukan nilai wajar, penilai independen menggunakan metode penilaian dengan mengkombinasikan dua pendekatan, yaitu pendekatan dengan mendiskontokan penerimaan kas di masa depan, dan pendekatan biaya yang menggunakan biaya penggantian pada saat ini.

PT Komet Infra Nusantara (KIN)

Nilai wajar menara telekomunikasi milik KIN, Entitas Anak, pada tanggal 30 Juni 2017 ditentukan berdasarkan penilaian internal dan pada tanggal 31 Desember 2016 ditentukan berdasarkan penilaian yang dilakukan KJPP Yanuar Bey & Rekan, penilai independen dalam laporannya No.Y&R/AV/17/0312 tanggal 15 Maret 2017.

Perubahan nilai wajar properti investasi pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian masing-masing sebesar nil dan Rp 14.743.380.539.

Pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016, sejumlah properti investasi milik KIN diasuransikan dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 456.175.000.000. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi nilai kerugian atas risiko yang dipertanggungkan.

PT Darmanusa Tritunggal (Darma)

Nilai wajar Menara telekomunikasi milik Darma, entitas anak tidak langsung, pada 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 ditentukan berdasarkan penilaian yang dilakukan masing-masing oleh pihak internal dan KJPP Yanuar Bey & Rekan, penilai independen dalam laporannya No. Y&R/AV/17/0313 tanggal 15 Maret 2017.

Perubahan nilai wajar property investasi dari Darma, Entitas Anak tidak langsung, pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian masing-masing sebesar nil dan Rp 14.956.080.678.

PT Quattro International (Quattro)

Nilai wajar Menara telekomunikasi milik Quattro, entitas anak tidak langsung, pada 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 ditentukan berdasarkan penilaian yang dilakukan masing-masing oleh penilaian internal dan KJPP Yanuar Bey & Rekan, penilai independen dalam laporannya No. Y&R/AV/17/0314 tanggal 15 Maret 2017.

Perubahan nilai wajar properti investasi dari Quattro pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian masing-masing sebesar nil dan Rp 23.510.086.744.

Properti investasi telah dijadikan jaminan atas pinjaman yang diperoleh KIN, Entitas Anak tidak langsung (Catatan 23).

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
PERIODE 6 BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

14. ASET TETAP

2 0 1 7	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Entitas anak yang baru diakuisisi	Reklasifikasi	Saldo akhir
Biaya perolehan						
<u>Pemilikan langsung</u>						
Tanah dan hak atas tanah	8.343.327.708	-	-	-	-	8.343.327.708
Bangunan dan prasarana	85.468.090.484	7.874.773.087	-	-	2.022.136.005	95.364.999.576
Mesin dan peralatan	49.442.607.832	4.743.046.173	3.909.444.025	-	-	50.276.209.980
Peralatan kantor	43.019.321.307	1.272.062.952	-	-	-	44.291.384.259
Kendaraan	10.978.259.564	1.564.497.628	-	-	-	12.542.757.192
	197.251.606.895	15.454.379.840	3.909.444.025	-	2.022.136.005	210.818.678.715
Aset dalam penyelesaian						
Bangunan	61.632.675.162	292.402.571	-	-	(2.022.136.005)	59.902.941.728
	258.884.282.057	15.746.782.411	3.909.444.025	-	-	270.721.620.443
Akumulasi penyusutan						
<u>Pemilikan langsung</u>						
Bangunan dan prasarana	10.867.118.344	2.412.069.250	-	-	-	13.279.187.594
Mesin dan peralatan	11.787.653.083	5.731.256.248	3.638.194.025	-	-	13.880.715.306
Peralatan kantor	28.101.140.409	4.043.457.002	-	-	-	32.144.597.411
Kendaraan	6.984.094.572	961.314.487	-	-	-	7.945.409.059
	57.740.006.408	13.148.096.987	3.638.194.025	-	-	67.249.909.370
Nilai Buku	201.144.275.649					203.471.711.073
2 0 1 6	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Entitas anak yang baru diakuisisi	Reklasifikasi	Saldo akhir
Biaya perolehan						
<u>Pemilikan langsung</u>						
Tanah dan hak atas tanah	4.819.884.783	3.523.442.925	-	-	-	8.343.327.708
Bangunan dan prasarana	85.512.108.625	-	44.018.141	-	-	85.468.090.484
Mesin dan peralatan	18.128.103.040	12.384.572.719	-	23.074.949.353	(4.145.017.280)	49.442.607.832
Peralatan kantor	36.885.479.188	7.468.962.476	1.341.120.357	6.000.000	-	43.019.321.307
Kendaraan	9.630.682.262	2.115.322.600	767.745.298	-	-	10.978.259.564
	154.976.257.898	25.492.300.720	2.152.883.796	23.080.949.353	(4.145.017.280)	197.251.606.895
Aset dalam penyelesaian						
Bangunan	10.350.769.543	51.270.518.519	-	11.387.100	-	61.632.675.162
	165.327.027.441	76.762.819.239	2.152.883.796	23.092.336.453	(4.145.017.280)	258.884.282.057
Akumulasi penyusutan						
<u>Pemilikan langsung</u>						
Bangunan dan prasarana	6.132.432.628	4.741.664.255	6.978.539	-	-	10.867.118.344
Mesin dan peralatan	10.364.875.773	3.079.407.429	-	2.316.224.828	(3.972.854.947)	11.787.653.083
Peralatan kantor	20.663.411.301	7.783.217.760	333.418.861	1.500.000	(13.569.791)	28.101.140.409
Kendaraan	5.504.282.772	1.930.201.079	450.389.279	-	-	6.984.094.572
	42.665.002.474	17.534.490.523	790.786.679	2.317.724.828	(3.986.424.738)	57.740.006.408
Nilai Buku	122.662.024.967					201.144.275.649

Laba penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

	2 0 1 7	2 0 1 6
Nilai perolehan	3.909.444.025	280.000.000
Akumulasi penyusutan	(3.638.194.025)	(280.000.000)
Nilai tercatat	271.250.000	-
Harga jual	201.250.000	24.554.917
Laba penjualan kendaraan	70.000.000	24.554.917

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
PERIODE 6 BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

14. ASET TETAP (Lanjutan)

Aset dalam penyelesaian merupakan aset tetap yang masih dalam tahap penyelesaian pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian untuk proyek pembangkit listrik tenaga mini-hidro sebesar Rp 59.902.941.728 pada tanggal 30 Juni 2017 dan Rp 61.632.675.162 pada tanggal 31 Desember 2016.

Manajemen tidak melihat adanya peristiwa yang akan menghambat penyelesaian aset dalam penyelesaian tersebut.

Beban penyusutan pada periode 6 bulan yang berakhir 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp 13.148.096.987 dan Rp 7.886.663.819 yang dibebankan pada beban langsung dan beban pokok pendapatan dan beban umum dan administrasi (Catatan 30 dan 31).

Berdasarkan penelaahan manajemen Kelompok Usaha, tidak terdapat kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016.

15. KONSESI JASA

a. Piutang atas Perjanjian Konsesi Jasa - Pengelolaan Air Bersih

Pendapatan konstruksi diakui berdasarkan nilai wajar jasa konstruksi yang tersedia untuk pembangunan fasilitas pengolahan air bersih (Catatan 2n).

DCC mengakui piutang konsesi, yang diukur pada nilai wajar sebesar Rp 85.813.263.944 dan Rp 83.672.503.223 pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 yang mencerminkan nilai kini dari jaminan pembayaran minimum yang akan diperoleh DCC dari PT Kawasan Industri Medan (Persero), dengan tingkat diskonto sebesar 15,68% masing-masing untuk tahun 2017 dan 2016.

Saat ini DCC telah mengoperasikan Instalasi Pengolahan Air Tahap I dengan kapasitas 100 liter/detik.

Untuk periode 6 bulan yang berakhir 30 Juni 2017 dan 2016, DCC telah mengakui pendapatan atas jasa konsesi masing-masing sebesar Rp 6.559.924.253 dan Rp 5.552.898.805 (Catatan 29).

b. Aset Takberwujud atas Perjanjian Konsesi

2017	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Entitas anak yang diakuisisi dan reklasifikasi	Saldo akhir
Hak pengusahaan jalan tol (Catatan 37)					
Biaya perolehan	1.824.997.260.630	5.682.144.944	-	-	1.830.679.405.574
Akumulasi amortisasi	660.680.072.907	34.571.064.128	-	-	695.251.137.035
Aset konsesi dalam penyelesaian	-	21.118.767.403	-	-	21.118.767.403
Bersih	1.164.317.187.723				1.156.547.035.942
Hak pengelolaan air bersih (Catatan 37)					
Biaya perolehan	179.061.796.612	7.630.810.100	-	-	186.692.606.712
Akumulasi amortisasi	12.825.953.672	292.068.199	-	-	13.118.021.871
Aset konsesi dalam penyelesaian	-	3.220.517.310	-	-	3.220.517.310
Bersih	166.235.842.940				176.795.102.151
Jumlah	1.330.553.030.663				1.333.342.138.093

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
PERIODE 6 BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

15. KONSESI JASA (Lanjutan)

c. Aset Takberwujud atas Perjanjian Konsesi

2016	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Entitas anak yang diakuisisi dan reklasifikasi	Saldo akhir
Hak pengusahaan jalan tol (Catatan 37)					
Biaya perolehan	1.694.687.901.283	130.618.359.347	309.000.000	-	1.824.997.260.630
Akumulasi amortisasi	595.273.761.839	65.437.177.397	30.866.329	-	660.680.072.907
Bersih	1.099.414.139.444				1.164.317.187.723
Hak pengelolaan air bersih (Catatan 37)					
Biaya perolehan	95.833.778.595	79.178.000.737	-	4.050.017.280	179.061.796.612
Akumulasi amortisasi	8.286.667.378	647.861.566	-	3.891.424.728	12.825.953.672
Bersih	87.547.111.217				166.235.842.940
Jumlah	1.186.961.250.661				1.330.553.030.663

Beban amortisasi hak pengusahaan jalan tol dan hak pengusahaan pengolahan air yang dibebankan kepada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk periode 6 bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp 34.863.132.327 dan Rp 30.379.095.465.

Pada tahun 2017 dan 2016, penambahan hak pengelolaan air bersih merupakan penambahan instalasi pengolahan air di SCTK, Entitas Anak tidak langsung.

Pada tahun 2016, penambahan aset takberwujud JTSE berasal dari pembangunan jembatan Tallo dan jalan.

Penjabaran lebih lanjut dari nilai buku bersih aset takberwujud setiap perjanjian konsesi jalan tol dan perjanjian konsesi pengolahan air adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Hak pengusahaan jalan tol		
Pondok Ranji - Pondok Aren	420.398.315.249	431.106.174.429
Tallo - Bandara Hasanuddin	653.847.187.374	665.691.107.296
Pelabuhan Soekarno-Hatta - Pelarani	82.301.533.319	67.519.905.998
	1.156.547.035.942	1.164.317.187.723
Hak pengelolaan air bersih		
Serang, Banten	176.795.102.151	166.235.842.940
Jumlah	1.333.342.138.093	1.330.553.030.663

Aset-aset hak pengusahaan jalan tol, pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya dengan jumlah nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 374.670.082.587 dan Rp 374.670.082.587. Manajemen entitas anak berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul atas risiko tersebut.

Pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016, aset hak pengusahaan jalan tol digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank oleh entitas anak.

Berdasarkan penelaahan manajemen Entitas anak, tidak terdapat kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset takberwujud pada tanggal-tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
PERIODE 6 BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

16. ASET TAKBERWUJUD LAINNYA

Akun ini merupakan *goodwill* atas akuisisi entitas anak dengan rincian sebagai berikut:

	<u>2 0 1 7</u>	<u>2 0 1 6</u>
Saldo awal	295.260.416.285	193.973.980.124
Penambahan	-	101.286.436.161
Saldo akhir	<u><u>295.260.416.285</u></u>	<u><u>295.260.416.285</u></u>

Rincian *goodwill* berdasarkan lini usaha adalah sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 4 Januari 2013, EI, Entitas Anak, mengakuisisi 51% saham IME dari pihak ketiga. EI mencatat aset dan liabilitas IME dengan menggunakan nilai wajar aset bersih pada tanggal 31 Desember 2012.
- a. Pada tanggal 11 April 2013, Potum, Entitas Anak, mengkonversi piutang beserta setoran tunainya menjadi 51% penyertaan saham DCC sebesar Rp 8.100.025.527 (Catatan 1d). Potum mencatat aset dan liabilitas DCC dengan menggunakan nilai wajar aset bersih pada tanggal 30 Juni 2013.
- b. Pada tanggal 24 Desember 2013, Potum juga mengkonversi piutang menjadi penyertaan saham pada SCTK sebesar Rp 8.923.000.000 (Catatan 1d). Potum mencatat aset dan liabilitas SCTK dengan menggunakan nilai wajar aset bersih pada tanggal 30 November 2013.
- c. Pada tanggal 21 Januari 2014, Telekom melakukan penyertaan pada KIN sebesar Rp 500.000.000.000 (Catatan 1d). Telekom mencatat aset dan liabilitas KIN menggunakan nilai wajar aset bersih pada tanggal 31 Desember 2013.
- d. Pada tanggal 14 Februari 2014, SCTK mengakuisisi 99,96% saham JSNM dari pihak ketiga dengan harga perolehan Rp 8.368.546.000. SCTK mencatat aset dan liabilitas JSNM dengan menggunakan nilai wajar aset bersih pada tanggal 31 Januari 2014.
- e. Pada tanggal 29 Desember 2015, KIN mengakuisisi 99,83% saham Darma dari pihak ketiga dengan harga perolehan Rp 102.550.000.000. KIN mencatat aset dan liabilitas Darma dengan menggunakan nilai wajar aset bersih pada tanggal 30 November 2015.
- f. Pada tanggal 19 Desember 2016, KIN mengakuisisi 99,99% saham Quattro dari pihak ketiga dengan harga perolehan Rp 249.444.502.839. KIN mencatat aset dan liabilitas Quattro dengan menggunakan nilai wajar aset bersih pada tanggal 30 Juni 2016.
- g. Pada November 2016, KIN mengakuisisi 99,99% saham GTP dari pihak ketiga dengan harga perolehan Rp 5.500.000.000. KIN mencatat aset dan liabilitas GTP dengan menggunakan nilai wajar aset bersih pada tanggal 31 Desember 2015.

PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
PERIODE 6 BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. ASET TAKBERWUJUD LAINNYA (Lanjutan)

Transaksi akuisisi Quattro pada tahun 2016 dihitung dengan menggunakan nilai wajar aset bersih dengan perincian sebagai berikut:

2 0 1 6	Quattro	GTP
Aset		
Kas dan bank	871.929.321	475.787
Piutang usaha	29.143.064.422	-
Aset lancar lainnya	149.999.600.000	-
Aset tetap	43.213.115.230	1.156.421.760
Aset tidak lancar lainnya	10.157.987.125	2.712.482.760
Jumlah aset	233.385.696.098	3.869.380.307
Liabilitas jangka pendek	(41.899.465.777)	(2.170.525.296)
Liabilitas jangka panjang	(39.527.018.654)	-
Jumlah Aset Bersih	151.959.211.667	1.698.855.011
Goodwill	97.485.291.172	3.801.144.989
Harga perolehan	249.444.502.839	5.500.000.000
Dikurangi kas yang diperoleh dari Entitas Anak yang diakuisisi	(871.929.321)	(475.787)
Akuisisi Entitas Anak, setelah dikurangi kas yang diperoleh	248.572.573.518	5.499.524.213

Pengujian penurunan nilai atas *goodwill* dilakukan secara tahunan pada akhir tahun dan ketika terdapat suatu indikasi bahwa nilai tercatatnya mengalami penurunan nilai.

Pada tahun 2015, telah dilakukan penilaian oleh KJPP Yanuar & Rekan, penilai independen, dan tidak terdapat penurunan nilai atas *goodwill* yang diperoleh dari KIN, JSNM, SCTK, DCC dan IME.

Dalam menentukan nilai wajar, penilai independen menentukan beberapa pendekatan yaitu pendekatan aset, pendekatan pasar dan pendekatan pendapatan. Pendekatan yang digunakan sesuai dengan kondisi masing-masing perusahaan.

17. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK

Pada tanggal 24 September 2014, Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit *Demand Loan* dari Victoria dengan maksimum pinjaman sebesar Rp 25.000.000.000 yang digunakan bagi pembiayaan modal kerja Perusahaan. Fasilitas ini memiliki jangka waktu 1 tahun dan dapat diperpanjang serta dikenakan tingkat suku bunga sebesar 17% per tahun.

Pada tanggal 28 September 2015, Perusahaan mendapatkan peningkatan fasilitas menjadi maksimum sebesar Rp 35.000.000.000. Fasilitas tersebut telah diperpanjang pada tanggal 28 September 2016 dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 September 2017.

Pinjaman ini dijamin dengan jaminan pribadi dan gadai saham MUN, Entitas Anak, yang dimiliki Perusahaan.

PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
PERIODE 6 BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. UTANG USAHA

Berdasarkan pemasok

	<u>2 0 1 7</u>	<u>2 0 1 6</u>
Pihak ketiga		
Optoscreen (M) Sdn. Bhd.	5.137.826.442	5.139.411.906
PT Perkasa Adiguna Sembada	3.502.017.357	7.323.787.200
PT Wideband Media Indonesia	2.457.514.017	4.181.386.068
CV Metro CME	1.143.829.481	2.392.096.571
Tarantula Global Holdings Pte. Ltd.	1.079.325.634	2.257.199.338
PT Griya Sarana Mandiri	953.135.746	328.922.774
PT Matra Mandiri Prima	943.475.223	1.973.094.664
Linklaters Singapore Pte Ltd	913.459.159	790.476.365
Allen & Overy (Asia) Pte. Ltd.	845.456.117	722.454.183
PT Hecca Inti Nusa	815.222.342	224.346.926
PT Merbau Prima Sakti	654.776.598	1.369.337.722
PT Nusantara Compnet Inegrator	440.766.977	294.386.714
PT Harrif Daya Tunggal Engineering	413.250.687	864.233.322
CV Pulung Manunggal	409.688.044	856.782.747
Winstech Engineering Pte. Ltd	403.748.176	426.099.625
Sembina Lumban Gaol	401.226.713	839.087.521
PT PLN (Persero)	388.790.989	813.080.626
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	377.982.303	1.993.297.767
CV Daya Prima Lintasindo	371.599.295	777.127.548
PT Armindo Catur Pratama	370.926.464	775.720.453
PT Packet Systems Indonesia	318.255.799	665.570.015
Assegaf Hamzah dan Partners	177.252.275	370.688.610
PT Juvisk Tri Swarna	157.281.094	1.910.321.913
PT Aulia Danardana	114.880.279	240.249.728
PT Putera Negara	107.276.032	3.622.311.767
PT Globalnine Indonesia	-	298.832.223
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 200.000.000)	3.859.920.044	5.349.831.448
sub-jumlah	<u>26.758.883.287</u>	<u>46.800.135.744</u>
Dikurangi utang usaha bagian jangka panjang	<u>(2.742.732.780)</u>	<u>(3.138.411.906)</u>
Bagian jangka pendek	<u>24.016.150.507</u>	<u>43.661.723.838</u>

Berdasarkan umur

	<u>2 0 1 7</u>	<u>2 0 1 6</u>
1 - 30 hari	7.213.051.165	12.901.605.404
31 - 60 hari	1.464.437.033	879.498.627
Lebih dari 60 hari	<u>15.338.662.309</u>	<u>29.880.619.807</u>
Jumlah	<u>24.016.150.507</u>	<u>43.661.723.838</u>

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
PERIODE 6 BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

19. UTANG NON-USAHA - PIHAK KETIGA

	<u>2 0 1 7</u>	<u>2 0 1 6</u>
Pinjaman jangka pendek	102.000.000.000	102.000.000.000
PT Komet Konsorsium	16.458.088.594	17.473.740.521
PT Perkasa Adiguna	7.323.787.200	-
PT PP (Persero) Tbk	6.573.220.000	6.573.220.000
PT Corona Telecommunication Services	4.246.268.165	4.289.134.359
Ratna Dewi Panduwinata	-	13.150.076
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 200.000.000)	13.953.644.188	7.051.940.066
Jumlah	<u>150.555.008.147</u>	<u>137.401.185.022</u>

Pada tanggal 17 Desember 2016, Potum, Entitas Anak, mendapat perpanjangan Fasilitas Pinjaman Berjangka dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk sebesar Rp 100.000.000.000 dengan tingkat suku bunga 5,75% per tahun dan jangka waktu 1 tahun.

Pada tanggal 12 Desember 2016, Potum, Entitas Anak, mendapat Fasilitas Pinjaman Berjangka dari PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk (dahulu PT Bank Windu International Tbk) sebesar Rp 2.000.000.000 yang digunakan untuk cadangan modal kerja usaha pengolahan air. Fasilitas ini dikenakan tingkat suku bunga 8% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 11 Desember 2017.

20. PERPAJAKAN

a. Pajak Dibayar di Muka

	<u>2 0 1 7</u>	<u>2 0 1 6</u>
Pajak Penghasilan Pasal 23	1.596.426.955	-
Pajak Pertambahan Nilai - Masukan	71.393.374.172	90.898.253.614
Jumlah	<u>72.989.801.127</u>	<u>90.898.253.614</u>

b. Utang Pajak

	<u>2 0 1 7</u>	<u>2 0 1 6</u>
Pajak Penghasilan		
Pasal 4 (2)	5.028.349.569	5.014.451.083
Pasal 21	2.857.997.407	4.859.596.956
Pasal 23	1.157.077.898	1.551.794.699
Pasal 25	973.742.661	689.155.722
Pasal 26	421.667.105	475.031.359
Pasal 29	8.265.870.044	16.483.220.120
Pajak Pertambahan Nilai - Keluaran	-	334.929.712
Pajak lainnya	-	17.867.677
Jumlah	<u>18.704.704.684</u>	<u>29.426.047.328</u>

PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
PERIODE 6 BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. PERPAJAKAN (Lanjutan)

c. Beban Pajak Penghasilan

	<u>2 0 1 7</u>	<u>2 0 1 6</u>
Beban pajak kini		
Perusahaan	-	-
Entitas anak	(20.386.523.000)	(8.501.693.500)
Beban (manfaat) pajak tangguhan		
Perusahaan	(3.289.843.390)	706.513.811
Entitas anak	(3.228.684.545)	1.235.406.408
	<u>(6.518.527.935)</u>	<u>1.941.920.219</u>
Jumlah	<u>(26.905.050.935)</u>	<u>(6.559.773.281)</u>

d. Perhitungan Fiskal

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, dengan estimasi rugi fiskal Perusahaan adalah sebagai berikut:

	<u>2 0 1 7</u>	<u>2 0 1 6</u>
Laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian	202.792.365.509	186.822.455.116
Laba entitas anak sebelum pajak penghasilan	(235.889.329.484)	(221.846.016.553)
Rugi sebelum pajak penghasilan Perusahaan	<u>(33.096.963.975)</u>	<u>(35.023.561.437)</u>
Beda temporer:		
Beban imbalan pasca-kerja	-	8.214.742.477
Penyusutan aset tetap	-	156.592.693
Beda tetap:		
Pegawai	909.077.797	1.213.489.622
Denda pajak	359.830.219	1.137.225.992
Penghasilan yang telah dikenakan pajak yang bersifat final	(19.549.408)	(2.508.600)
Lain-lain	<u>-</u>	<u>182.807.298</u>
Taksiran rugi fiskal tahun berjalan	(31.847.605.367)	(24.121.211.955)
Kompensasi kerugian fiskal tahun:		
2 0 1 6 **)	(62.860.518.799)	-
2 0 1 5 **)	(55.192.557.381)	(55.714.414.036)
2 0 1 4 **)	(93.764.279.100)	(93.764.270.100)
2 0 1 3	(29.744.466.286)	(29.744.466.286)
2 0 1 2 **)	(45.006.978.929)	(43.385.563.655)
2 0 1 1	-	(22.448.842.520)
Penyesuaian kompensasi fiskal tahun 2012	45.006.978.929	-
Penyesuaian kompensasi fiskal tahun 2011	<u>-</u>	<u>22.448.842.520</u>
Akumulasi rugi fiskal	<u>(273.409.426.933)</u>	<u>(246.729.926.032)</u>

**) Sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahun Pajak Penghasilan Badan

PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
PERIODE 6 BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. PERPAJAKAN (Lanjutan)

e. Pajak Tangguhan

Pengaruh pajak tangguhan atas beda temporer yang signifikan antara laporan komersial dan fiskal untuk periode 6 bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016, sebagai berikut:

	2017	2016
Perusahaan		
Penyusutan aset tetap	-	418.092.359
Imbalan pasca kerja	-	(39.148.172)
Rugi fiskal	(3.289.843.390)	1.844.028.815
Sub Jumlah	(3.289.843.390)	2.222.973.002
Entitas anak		
Aset tetap dan aset takberwujud	792.909.908	872.873.910
Beban provisi lainnya	179.796.874	(309.482.840)
Imbalan pasca kerja	49.295.711	8.809.907.905
Laba atas nilai wajar	(1.971.546.000)	(11.693.842.292)
Beban keuangan	-	(249.734.015)
Rugi fiskal	(2.279.141.038)	1.338.494.848
Sub Jumlah	(3.228.684.545)	(1.231.782.484)
Jumlah (manfaat) beban pajak tangguhan - bersih	(6.518.527.935)	991.190.518

Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Aset pajak tangguhan		
Perusahaan		
Rugi fiskal	68.352.356.734	71.642.200.125
Penyusutan aset tetap	1.704.964.283	1.704.964.283
Imbalan pasca kerja	2.568.277.619	2.568.277.619
Sub jumlah	72.625.598.636	75.915.442.027
Entitas anak		
Rugi fiskal	15.088.640.642	15.088.640.640
Imbalan pasca kerja	1.814.429.657	1.814.429.657
Beban keuangan	9.631.957	9.631.957
Aset tetap dan aset takberwujud	(865.263.752)	(865.263.752)
Laba atas nilai wajar	(5.877.521.686)	(5.877.521.686)
Subjumlah	10.169.916.818	10.169.916.816
Jumlah aset pajak tangguhan - bersih	82.795.515.454	86.085.358.843
Liabilitas pajak tangguhan		
Entitas anak		
Provisi lainnya	778.081.495	598.284.621
Beban keuangan	99.333.734	99.333.734
Provisi pemeliharaan jalan tol	(70.199.606)	(70.199.606)
Rugi fiskal	(1.090.574.366)	1.188.566.672
Imbalan pasca kerja	(22.073.640.248)	(22.122.935.959)
Aset tetap dan aset takberwujud	(41.327.782.725)	(42.120.692.633)
Laba atas nilai wajar	(58.368.067.358)	(56.396.521.460)
Jumlah liabilitas pajak tangguhan - bersih	(122.052.849.074)	(118.824.164.631)

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
PERIODE 6 BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

21. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA

	<u>2 0 1 7</u>	<u>2 0 1 6</u>
Menara telekomunikasi	69.366.878.037	61.537.538.570
Iklan	<u>8.907.338.005</u>	<u>2.882.104.137</u>
Jumlah	78.274.216.042	64.419.642.707
Dikurangi:		
Bagian jangka pendek	<u>(8.511.354.417)</u>	<u>(2.434.037.211)</u>
Bagian jangka panjang	<u><u>69.762.861.625</u></u>	<u><u>61.985.605.496</u></u>

Pendapatan iklan diterima di muka merupakan penyewaan papan iklan di ruas jalan tol milik BSD dan BMN, Entitas Anak tidak langsung.

Pendapatan menara telekomunikasi diterima dimuka merupakan pendapatan sewa atas menara telekomunikasi milik KIN dan Darma, Entitas Anak tidak langsung.

22. UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN

	<u>2 0 1 7</u>	<u>2 0 1 6</u>
PT Bank Central Asia Tbk	1.001.055.417	262.455.221
PT Indomobil Finance Indonesia	485.247.310	580.089.474
PT CIMB Niaga Auto Finance	227.349.179	-
PT Mandiri Tunas Finance	172.370.905	-
PT Toyota Astra Financial Services	156.391.790	141.206.000
PT BCA Finance	29.270.830	371.198.899
Cisco System Capital Asia Pte. Ltd	-	3.996.533.685
PT Astra Sedaya Finance	<u>-</u>	<u>58.563.000</u>
Jumlah	2.071.685.431	5.410.046.279
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	<u>(1.399.151.087)</u>	<u>(3.292.827.026)</u>
Bagian jangka panjang	<u><u>672.534.344</u></u>	<u><u>2.117.219.253</u></u>

PT Komet Infranusantara (KIN)

Pada tahun 2014, KIN, Entitas Anak tidak langsung, mengadakan perjanjian pembiayaan konsumen dengan PT Bank Central Asia Tbk (KKB), pihak ketiga, untuk membiayai pembelian kendaraan. Utang pembiayaan ini dikenakan suku bunga tetap 5,99% dengan jangka waktu 4 tahun.

PT Sarana Catur Tirta Kelola (SCTK)

Pada tahun 2014, SCTK, Entitas Anak tidak langsung, mengadakan perjanjian pembiayaan konsumen dengan PT Astra Sedaya Finance, pihak ketiga, untuk membiayai pembelian kendaraan. Utang pembiayaan ini dikenakan suku bunga 5,60% dengan jangka waktu 3 tahun.

Pada tahun 2014, SCTK, Entitas Anak tidak langsung, mengadakan perjanjian pembiayaan dengan PT Toyota Astra Financial Services, pihak ketiga, untuk membiayai pembelian kendaraan. Utang pembiayaan ini dikenakan suku bunga 7,10% dengan jangka waktu 4 tahun.

PT Bosowa Marga Nusantara (BMN) dan PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE)

Pada tahun 2015, BMN, Entitas Anak tidak langsung, mengadakan perjanjian pembiayaan dengan PT Indomobil Finance Indonesia, pihak ketiga, untuk membiayai pembelian kendaraan. Utang pembiayaan ini dikenakan suku bunga antara 8,74% - 8,87% dan akan jatuh tempo dalam 4 tahun.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
PERIODE 6 BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

22. UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN (Lanjutan)

PT Bosowa Marga Nusantara (BMN) dan PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE) (Lanjutan)

Pada tahun 2013, BMN dan JTSE, Entitas Anak tidak langsung, mengadakan perjanjian pembiayaan konsumen dengan PT BCA Finance, pihak ketiga, untuk membiayai pembelian kendaraan. Utang pembiayaan ini dikenakan suku bunga antara 4,35% - 8,45% dan akan jatuh tempo dalam 2 hingga 4 tahun.

PT Quattro International (Quattro)

Pada bulan 2013, Quattro, Entitas Anak tidak langsung, menandatangani perjanjian pinjaman dengan pemasok yaitu Cisco System Capital Asia Pte. Ltd., untuk tujuan pembelian peralatan elektronik. Perjanjian ini berjangka waktu 5 tahun dan suku bunga tetap 18%

Seluruh utang pembiayaan tersebut dijamin dengan kendaraan yang dibiayai dengan pembiayaan konsumen yang bersangkutan (Catatan 13).

23. PINJAMAN JANGKA PANJANG

Rincian pinjaman jangka panjang pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

	<u>2 0 1 7</u>	<u>2 0 1 6</u>
Pinjaman bank	626.941.301.821	686.819.697.185
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(1.467.399.215)	(2.695.522.395)
Pinjaman bank, bersih	625.473.902.606	684.124.174.790
Pinjaman sindikasi	848.308.150.027	817.930.429.208
Lembaga non-keuangan	615.080.570.577	615.080.570.577
Lembaga keuangan	212.760.000.000	212.760.000.000
Jumlah	2.301.622.623.210	2.329.895.174.575
Dikurangi: Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(167.292.409.739)	(178.737.482.876)
Pinjaman bank jangka panjang	<u>2.134.330.213.471</u>	<u>2.151.157.691.699</u>

a. Pinjaman Bank

	<u>2 0 1 7</u>	<u>2 0 1 6</u>
PT Bank Central Asia Tbk	478.192.161.873	538.637.565.618
PT Bank ICBC Indonesia	99.175.000.557	95.402.549.811
PT Bank Pan Indonesia Tbk	49.093.921.391	51.619.896.440
PT Bank Ganesha Tbk	480.218.000	1.159.685.316
Jumlah pinjaman	626.941.301.821	686.819.697.185
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(1.467.399.215)	(2.695.522.395)
Jumlah	625.473.902.606	684.124.174.790
Dikurangi: bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(167.292.409.739)	(152.873.182.876)
Bagian jangka panjang	<u>458.181.492.867</u>	<u>531.250.991.914</u>

I. Perusahaan

i. PT Bank Pan Indonesia Tbk (Panin)

Pada tanggal 13 Juni 2014, Perusahaan memperoleh fasilitas Pinjaman Jangka Panjang dari Panin dengan maksimum pinjaman sebesar Rp 61.000.000.000. Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 11% - 11,5% per tahun (*floating*) dan akan jatuh tempo tanggal 13 Juni 2024, yang digunakan untuk pembiayaan pembelian 3 (tiga) unit ruang kantor dengan total luas 674,6 m² yang terletak di Equity Tower Lantai 38, Jakarta. Pinjaman ini dijamin dengan ruang kantor yang dibeli melalui pinjaman ini.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
PERIODE 6 BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

23. PINJAMAN JANGKA PANJANG (Lanjutan)

a. Pinjaman Bank (Lanjutan)

I. Perusahaan (Lanjutan)

i. PT Bank Pan Indonesia Tbk (Panin) (Lanjutan)

Perjanjian utang antara Perusahaan dan Panin memuat beberapa pembatasan yang mengharuskan Perusahaan memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Panin untuk:

- a) Menggunakan fasilitas kredit selain dari tujuan dan keperluan yang telah disepakati sebelumnya;
- b) Melakukan perluasan atau penyempitan usaha.

Pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016, saldo pinjaman masing-masing sebesar Rp 49.093.921.391 dan Rp 51.619.896.440.

ii. PT Bank Ganesha Tbk (Ganesha)

Pada tanggal 23 Desember 2015, Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Investasi dari Ganesha dengan maksimum pinjaman sebesar Rp 2.100.000.000 yang digunakan untuk kepentingan investasi. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 23 Januari 2018 dan dapat diperpanjang serta dikenakan tingkat suku bunga sebesar 12,5% per tahun.

Pinjaman ini dijamin dengan tanah dan bangunan ruko di Tangerang, Banten, atas nama BSD, entitas anak tidak langsung.

Pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016, saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp 480.218.000 dan Rp 1.159.685.316.

II. PT Bosowa Marga Nusantara (BMN)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

Sejak tanggal 28 Juli 2011, BMN, Entitas Anak tidak langsung, memperoleh fasilitas Kredit Investasi dari BCA sebesar Rp 40.470.000.000 untuk pembiayaan pelunasan pinjaman dari PT Bank Mega Tbk. Pinjaman ini dikenakan bunga pinjaman yang dibayar secara bulanan sebesar 10,75% per tahun masing-masing untuk tahun 2017 dan 2016. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada bulan Agustus 2019.

Berdasarkan Perjanjian kredit terakhir yang dinyatakan dalam perjanjian dengan BCA No.174/Add-KCK/2014 tanggal 14 Juli 2014 dan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) pada tanggal 22 September 2014, Perusahaan memiliki fasilitas Time Loan Revolving ("TLR") yang dapat digunakan bersama-sama dengan JTSE dan BSD, pihak berelasi, sebesar Rp 13.750.000.000 untuk membiayai perbaikan dan pemeliharaan jalan tol skala menengah.

Berdasarkan SPPK No. 20502/GBK/2016 tanggal 14 November 2016, fasilitas TLR berakhir dan tidak diperpanjang sejak tanggal 17 Desember 2016.

Pinjaman ini dijamin oleh hak pengusahaan jalan tol, seluruh hasil tagihan jalan tol seksi I dan II, saham Entitas Anak yang dimiliki oleh BMN, penerimaan dari ganti rugi asuransi dari Pemerintah atau Badan Usaha Jalan Tol yang baru sesuai ketentuan PPJT, *Escrow Account*, *Operating Account* dan *Debt Service Account*, *Letter of Undertaking* (LoU) BMN.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
PERIODE 6 BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

23. PINJAMAN JANGKA PANJANG (Lanjutan)

a. Pinjaman Bank (Lanjutan)

II. PT Bosowa Marga Nusantara (BMN) Lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (Lanjutan)

Perjanjian pinjaman antara BMN dan BCA memuat beberapa pembatasan, yang mengharuskan Entitas anak memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA, terutama untuk:

1. Mendapatkan pinjaman baru
2. Melakukan divestasi atau merger dan memberikan jaminan
3. Pembayaran dividen kas
4. Menjaminkan utang, harga kekayaan atau *Corporate Guarantee* ke pihak lain

Selama masa berlakunya perjanjian tersebut, BMN harus mempertahankan *debt to equity ratio* maksimum sebesar 4 kali dan *debt service coverage ratio* sebesar minimum 1 kali. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2017, BMN telah mematuhi persyaratan dalam perjanjian-perjanjian fasilitas kredit tersebut.

Pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016, saldo pinjaman masing-masing sebesar Rp 17.256.380.499 dan Rp 20.504.800.000.

Jumlah beban bunga pada periode 6 bulan yang berakhir 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp 1.033.812.967 dan Rp 1.413.816.640.

III. PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

Sejak tanggal 28 Juli 2011, JTSE, Entitas Anak tidak langsung, memperoleh fasilitas Kredit Investasi dari BCA sebesar Rp 349.998.944.183 untuk membiayai kembali pinjaman dari PT Bank Mega Tbk. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada bulan Agustus 2019 dan dikenakan bunga mengambang terutang secara bulanan. Tingkat bunga rata-rata pada tahun 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar 11%.

Berdasarkan perubahan pertama Perjanjian Kredit dalam Akta No. 10 tanggal 10 Februari 2012, JTSE memperoleh fasilitas Kredit Investasi 2 dari BCA sebesar Rp 25.474.000.000 yang digunakan untuk membiayai perbaikan jalan tol berupa pelapisan, *construction change order* dan rekonstruksi *slab* beton. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada bulan Februari 2020 dan dikenakan bunga mengambang yang terutang secara bulanan. Tingkat bunga rata-rata pada tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar 11%.

Pada tanggal 21 Desember 2015, JTSE memperoleh fasilitas Kredit Investasi Tambahan (KI-3) dari BCA dengan plafond maksimal sebesar Rp 120.558.000.000 untuk membiayai pembangunan Jembatan Tallo, perbaikan *frontage* dan investasi lainnya. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada bulan Desember 2023 dan dikenakan tingkat bunga sebesar 11% per tahunnya.

Berdasarkan Perjanjian kredit terakhir yang dinyatakan dalam perjanjian dengan BCA No. 176/Add-KCK/2014 tanggal 14 Juli 2014 dan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) pada tanggal 22 September 2014, Perusahaan memiliki fasilitas Time Loan Revolving ("TLR") yang dapat digunakan bersama-sama dengan BMN BSD, pihak berelasi, sebesar Rp 13.750.000.000 untuk membiayai perbaikan dan pemeliharaan jalan tol skala menengah.

Berdasarkan SPPK No. 20502/GBK/2016 tanggal 14 November 2016, fasilitas TLR berakhir dan tidak diperpanjang sejak tanggal 17 Desember 2016.

Jaminan atas pinjaman ini adalah hak pengusahaan jalan tol, seluruh hasil tagihan jalan tol seksi I dan II, saham JTSE, penerimaan dari ganti rugi asuransi dari Pemerintah atau Badan Usaha Jalan Tol yang baru sesuai ketentuan PPJT, *Escrow Account*, *Operating Account* dan *Debt Service Account*, *Letter of Undertaking* (LoU) JTSE.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
PERIODE 6 BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

23. PINJAMAN JANGKA PANJANG (Lanjutan)

a. Pinjaman Bank (Lanjutan)

III. PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE) (Lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (Lanjutan)

Perjanjian pinjaman antara JTSE dan BCA memuat beberapa pembatasan, yang mengharuskan JTSE memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA, terutama untuk:

1. Mendapatkan pinjaman baru
2. Melakukan divestasi atau merger dan memberikan jaminan
3. Pembayaran dividen kas
4. Menjaminkan utang, harga kekayaan atau *Corporate Guarantee* ke pihak lain

Selama masa berlakunya perjanjian tersebut, JTSE harus mempertahankan *debts to equity ratio* maksimum sebesar 4 kali dan *debt service coverage ratio* sebesar minimum 1 kali. Pada tanggal 30 Juni 2017, JTSE telah memenuhi seluruh kesepakatan sebagaimana tertulis pada perjanjian fasilitas kredit.

Pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016, saldo pinjaman dari seluruh fasilitas kredit investasi (KI) masing-masing sebesar Rp 264.523.263.439 dan Rp 297.797.035.141.

Jumlah beban bunga atas seluruh pinjaman pada periode 6 bulan yang berakhir 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp 15.080.604.217 dan Rp 16.570.588.766.

IV. PT Bintaro Serpong Damai (BSD)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

Pada tanggal 28 Juli 2011, BSD, Entitas Anak tidak langsung memperoleh fasilitas Kredit Investasi dari BCA sebesar Rp 349.170.000.000 untuk membiayai kembali pinjaman dari PT Bank Mega Tbk.

Pinjaman ini akan jatuh tempo pada Oktober 2019 dan dikenakan bunga mengambang dibayar secara bulanan. Tingkat bunga rata-rata per tahun masing - masing sebesar 10,75% pada tahun 2017 dan 2016.

Selanjutnya, berdasarkan perubahan kedua Perjanjian Kredit yang dinyatakan dalam Akta No. 11 tanggal 17 September 2012, BSD memperoleh Kredit Investasi dari BCA sebesar Rp 22.125.000.000. Tingkat bunga rata-rata per tahun masing - masing adalah 10,75% tahun 2017 dan 2016.

Berdasarkan Perjanjian kredit terakhir yang dinyatakan dalam perjanjian dengan BCA No. 175/Add-KCK/2014 tanggal 14 Juli 2014 dan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) No. 20342/GBK/2014 pada tanggal 22 September 2014, Perusahaan memiliki fasilitas Time Loan Revolving ("TLR") yang dapat digunakan bersama-sama dengan BMN dan JTSE, pihak berelasi, sebesar Rp 13.750.000.000 untuk membiayai perbaikan dan pemeliharaan jalan tol skala menengah.

Berdasarkan SPPK No. 20502/GBK/2016 tanggal 14 November 2016, fasilitas TLR berakhir dan tidak diperpanjang sejak tanggal 17 Desember 2016.

Pinjaman ini dijamin oleh hak pengusahaan jalan tol, seluruh hasil tagihan jalan tol seksi I dan II, saham BSD, penerimaan dari ganti rugi asuransi dari Pemerintah atau Badan Usaha Jalan Tol yang baru sesuai ketentuan PPJT, Rekening Escrow, Rekening Operasi dan *Debt Service Account*, LoU BSD.

PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
PERIODE 6 BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. PINJAMAN JANGKA PANJANG (Lanjutan)

a. Pinjaman Bank (Lanjutan)

IV. PT Bintaro Serpong Damai (BSD) (Lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (Lanjutan)

Perjanjian pinjaman antara BSD dan BCA memuat beberapa pembatasan, yang mengharuskan BSD memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA, terutama untuk:

1. Mendapatkan pinjaman baru
2. Melakukan divestasi atau merger dan memberikan jaminan
3. Pembayaran dividen kas
4. Menjaminkan utang, harga kekayaan atau *Corporate Guarantee* ke pihak lain

Selama masa berlakunya perjanjian tersebut, BSD harus mempertahankan *debt to equity ratio* maksimum sebesar 4 kali dan *debt service coverage ratio* sebesar minimum 1 kali. Pada tanggal 30 Juni 2017, BSD telah memenuhi seluruh kesepakatan sebagaimana tertulis pada perjanjian fasilitas kredit.

Pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016, saldo pinjaman masing-masing sebesar Rp 178.247.577.298 dan Rp 199.750.138.892.

Jumlah beban bunga bank pada tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp 10.216.893.193 dan Rp 13.545.468.903.

V. PT Dain Celicani Cemerlang (DCC)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

Pada tanggal 19 Juni 2013, DCC, Entitas Anak tidak langsung, memperoleh fasilitas Kredit Investasi dan Bank Garansi dari BCA dengan jumlah pokok masing-masing tidak lebih dari Rp 45.000.000.000 dan Rp 3.685.000.000. Tingkat bunga Kredit Investasi per tahun adalah sebesar 10,25%. Pinjaman ini akan jatuh tempo maksimum 7 tahun setelah penarikan.

Fasilitas pinjaman ini dipergunakan oleh DCC untuk membiayai instalasi pengolahan air (IPA) bersih, membeli peralatan IPA dan jaminan pelaksanaan serta jaminan penyediaan air bersih ke PT Kawasan Industri Medan (Persero) (KIM), Medan, Sumatera Utara.

Pinjaman ini dijamin dengan perjanjian konsesi dari KIM, piutang DCC kepada KIM, seluruh saham DCC, seluruh aset atas proyek yang dibiayai oleh BCA, rekening *escrow*, rekening *operating* dan *debt service*, LoU dari Perusahaan.

Perjanjian pinjaman antara DCC dan BCA memuat beberapa pembatasan, yang mengharuskan DCC memperoleh persetujuan dari BCA, di antaranya untuk:

1. Merubah pemegang saham kecuali pengalihan saham ke TBN, Entitas Anak tidak langsung, sebesar 20%.
2. Penggantian DCC sebagai operator IPA di KIM kecuali ke TBN.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
PERIODE 6 BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

23. PINJAMAN JANGKA PANJANG (Lanjutan)

a. Pinjaman Bank (Lanjutan)

V. PT Dain Celicani Cemerlang (DCC) (Lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (Lanjutan)

Perjanjian pinjaman antara DCC dan BCA memuat beberapa pembatasan, yang mengharuskan DCC memperoleh persetujuan dari BCA, di antaranya untuk: (Lanjutan)

3. Penggantian TBN sebagai supervisi DCC
4. Mendapatkan pinjaman baru
5. Melakukan divestasi atau merger dan memberikan jaminan
6. Perubahan bisnis utama
7. Pembayaran dividen
8. Menjamin utang, harta kekayaan atau memberikan *Corporate Guarantee* ke pihak lain

Saldo utang bank pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp 17.644.792.793 dan Rp 20.585.591.585.

Beban bunga untuk pada tahun 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp 1.101.114.713 dan Rp 1.443.595.241.

VI. PT Sarana Catur Tirta Kelola (SCTK)

PT Bank ICBC Indonesia (ICBC)

Berdasarkan Akta No. 66 tanggal 15 April 2015, SCTK memperoleh fasilitas pinjaman investasi dari ICBC dengan plafon sebesar Rp 102.000.000.000 yang akan digunakan untuk membiayai investasi SCTK. Fasilitas kredit tersebut akan dikenakan tingkat bunga mengambang sebesar 12,5% per tahun dan akan jatuh tempo pada tahun 2023.

Pinjaman ini dijamin dengan fidusia atas penjualan air bersih dan piutang usaha terkait, aset terkait, *Corporate Guarantee* dari PT Potum Mundi Infranasantara dan LoU dari Perusahaan.

Perjanjian pinjaman antara SCTK dan ICBC memuat beberapa pembatasan, yang mengharuskan SCTK memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari ICBC, di antaranya untuk:

- (i) Mendapatkan pinjaman baru dari pihak ketiga lainnya;
- (ii) Menjamin utang, harta kekayaan atau memberikan *Corporate Guarantee* ke pihak lain;
- (iii) Melakukan investasi, merger, akuisisi atau penempatan pemilikan pada perusahaan lainnya;
- (iv) Menjual aset terkait;
- (v) Membagikan dividen;
- (vi) Mengubah bisnis utama; dan
- (vii) Melakukan perubahan atas Anggaran Dasar, perubahan Dewan Direksi atau Komisaris.

Saldo pinjaman pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp 98.431.250.557 dan Rp 95.402.549.811.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
PERIODE 6 BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

23. PINJAMAN JANGKA PANJANG (Lanjutan)

b. Pinjaman Sindikasi

PT Komet Infra Nusantara (KIN)

Pinjaman Bank Sindikasi Cathay United Bank, Co. Ltd. (CUB) dengan The Hongkong, Ing Bank N.V., Singapore (ING) and Shanghai Banking Corporation Limited, Hongkong (HSBC).

Pada tanggal 19 Oktober 2016, KIN, Entitas Anak tidak langsung, memperoleh Fasilitas Pinjaman Berjangka (*Term Loan Facility*) A, B1, B2, C1, dan C2 dari sindikasi Cathay United Bank Co. Ltd, (CUB), Ing Bank N.V., Singapore (ING) dan The Hong Kong and Shanghai Banking Co. Ltd (HSBC) dengan jumlah plafon sebesar USD 78.333.333 dan Rp 152.500.000.000, serta Fasilitas Pinjaman Bergulir (*Revolving Facility*) dengan maksimum penarikan sebesar Rp 97.500.000.000.

1) Fasilitas *Term Loan* A (TLF A)

TLF A mempunyai plafon sebesar USD 55.000.000 yang digunakan oleh KIN untuk membiayai:

- a) Pembayaran kembali seluruh pinjaman Sindikasi CUB dan HSBC berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman tertanggal 5 November 2014, tidak termasuk jumlah Fasilitas *Revolving*.
- b) Pembayaran biaya transaksi dan beban sehubungan atas pembayaran kembali untuk seluruh pinjaman sindikasi sebelumnya.
- c) Deposit dengan jumlah yang sama dengan Debt Service Reserve Account (DSRA).

TLF A akan jatuh tempo pada 11 November 2021 dengan pembayaran pokok yang dicicil secara kuartalan dimulai dari Maret 2017 berdasarkan persentase pembayaran yang telah disepakati. Pinjaman ini dikenakan bunga LIBOR 3-bulan plus margin sebesar 4,25% yang dibayarkan secara kuartalan. Tingkat bunga rata-rata pada tahun 2017 dan 2016 adalah 11,00%. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2017, KIN telah mencairkan seluruh pinjaman TLF A.

2) Fasilitas *Term Loan* B1 (TLF B1)

TLF B1 mempunyai plafon sebesar USD 18.333.333 dengan pencairan minimum sebesar USD 500.000 yang digunakan oleh KIN untuk:

- a) Kewajiban yang timbul dari akuisisi yang diizinkan.
- b) Seluruh biaya dan beban, bea, pendaftaran, dan pajak terkait dengan akuisisi yang diizinkan.
- c) Belanja modal.
- d) Jumlah yang masih harus dibayar oleh debitur sehubungan dengan akuisisi Quattro, Entitas Anak, tidak langsung dan atau mengembalikan saldo kas dari debitur sebelumnya yang telah digunakan untuk mendanai pembayaran sehubungan dengan akuisisi PT Quattro International sampai sebelum 31 Januari 2017.
- e) Mengembalikan saldo kas dari debitur sebelumnya digunakan untuk mendanai pembayaran sehubungan dengan akuisisi PT Vitrama, hanya dapat digunakan setelah 31 Desember 2016.
- f) Deposit dengan jumlah yang sama dengan *Debt Service Reserve Account* (DSRA).

g) Pembiayaan kembali setiap Fasilitas *Revolving*

TLF B1 akan jatuh tempo pada 11 November 2021 dengan pembayaran pokok yang dicicil secara kuartalan dimulai dari September 2019 berdasarkan persentase pembayaran yang telah disepakati. Pinjaman ini dikenakan bunga LIBOR 3-bulan plus margin sebesar 4,25% yang dibayarkan secara kuartalan. Tingkat bunga rata-rata pada tahun 2017 adalah 11,00%. Pada tanggal 30 Juni 2017, KIN telah mencairkan seluruh pinjaman fasilitas TLF B1.

2) Fasilitas *Term Loan* B2 (TLF B2)

TLF B2 mempunyai plafon sebesar Rp 120.000.000.000 dengan pencairan minimum sebesar Rp 5.000.000.000 dengan ketentuan penggunaan sama seperti TLF B1.

TLF B2 akan jatuh tempo pada 11 November 2021 dengan pembayaran pokok yang dicicil secara kuartalan dimulai dari September 2019 berdasarkan persentase pembayaran yang telah disepakati. Pinjaman ini dikenakan bunga JIBOR 3-bulan plus margin sebesar 6,00% yang dibayarkan secara kuartalan. Tingkat bunga rata-rata pada tahun 2017 adalah 12,94%. Pada tanggal 30 Juni 2017, KIN telah mencairkan seluruh pinjaman fasilitas TLF B2.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
PERIODE 6 BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

23. PINJAMAN JANGKA PANJANG (Lanjutan)

b. Pinjaman Sindikasi (Lanjutan)

PT Komet Infra Nusantara (KIN) (Lanjutan)

3) Fasilitas *Term Loan* C1 (TLF C1)

TLF C1 mempunyai plafon sebesar USD 5.000.000. dengan pencairan minimum sebesar USD 500.000 dengan ketentuan penggunaan sama seperti TLF B1.

Sampai dengan tanggal 30 Juni 2017, KIN belum menarik seluruh pinjaman fasilitas TLF C1. TLF C1 akan jatuh tempo pada 5 tahun sejak tanggal penarikan awal fasilitas dengan pembayaran pokok yang dicicil secara kuartalan dimulai dari September 2019 berdasarkan persentase pembayaran yang telah disepakati. Pinjaman ini dikenakan bunga LIBOR 3-bulan plus margin sebesar 4,25% yang dibayarkan secara kuartalan.

4) Fasilitas *Term Loan* C2 (TLF C2)

TLF C2 mempunyai plafon sebesar Rp 32.500.000.000 dengan pencairan minimum sebesar Rp 5.000.000.000 dengan ketentuan penggunaan sama seperti TLF B1.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, KIN belum menarik seluruh pinjaman fasilitas TLF C2. TLF C2 akan jatuh tempo pada 5 tahun sejak tanggal penarikan awal fasilitas dengan pembayaran pokok yang dicicil secara kuartalan dimulai dari September 2019 berdasarkan persentase pembayaran yang telah disepakati. Pinjaman ini dikenakan bunga JIBOR 3-bulan plus margin sebesar 6,00% yang dibayarkan secara kuartalan.

5) Fasilitas Pinjaman Bergulir (RF)

Fasilitas ini mempunyai syarat pencairan minimum sebesar Rp 97.500.000.000 yang digunakan untuk membiayai operasional dan modal kerja.

Fasilitas ini akan jatuh tempo pada 11 November 2021 dengan pembayaran pokok yang dilakukan pada akhir periode pinjaman yang disepakati. Pinjaman ini dikenakan bunga dasar JIBOR 3-bulan plus margin 6,00% dengan tingkat bunga rata-rata pada tahun 2017 sebesar 12,94%. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2017, KIN telah mencairkan sebagian dari pinjaman fasilitas RF sebesar Rp 25.000.000.000.

c. Lembaga Keuangan

Perusahaan

Pada tanggal 25 Mei 2016 dan 2 Agustus 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman "*Promoter Financing*" dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI) dengan plafon masing-masing sebesar Rp 146.000.000.000 dan Rp 70.000.000.000 yang digunakan untuk peningkatan modal pada Telekom, Entitas Anak (Catatan 1d). Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 25 Mei 2020 dan dikenakan tingkat suku bunga JIBOR 3-bulan plus margin 4,25% per tahun.

Perjanjian pinjaman antara Perusahaan dan SMI dijamin dengan sejumlah saham yang dimiliki Perusahaan pada MUN, Telekom, Entitas-Entitas Anak dan saham yang dimiliki MUN pada BMN, Entitas Anak tidak langsung.

Perjanjian pinjaman antara Perusahaan dan SMI memuat beberapa pembatasan, yang mengharuskan Perusahaan memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari SMI, terutama untuk:

- (i) Mendapatkan pinjaman baru;
- (ii) Menyerahkan hak atau kewajiban Perusahaan yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan kepada pihak lain;
- (iii) Melakukan divestasi, merger, konsolidasi dan akuisisi sebagian/seluruh saham perusahaan lain;
- (iv) Menjaminkan utang, harga kekayaan atau *Corporate Guarantee* ke pihak lain;
- (v) Menjual atau melepaskan harta kekayaan Perusahaan yang dijaminkan;
- (vi) Melakukan penarikan dan/atau pemindahbukuan dana dari rekening *Debt Service Reserve Account* (DSRA);
- (vii) Melakukan penjualan saham Telekom.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
PERIODE 6 BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

23. PINJAMAN JANGKA PANJANG (Lanjutan)

c. Lembaga Keuangan (Lanjutan)

Perusahaan (Lanjutan)

Selama masa berlakunya perjanjian tersebut, Perusahaan harus mempertahankan *current ratio* minimal 1,2 kali, *debts to equity* ratio maksimum sebesar 2,5 kali dan *debt to EBITDA* ratio maksimum sebesar 4,5 kali. Sampai dengan 30 Juni 2017, Perusahaan telah memenuhi seluruh kesepakatan sebagaimana tertulis pada perjanjian fasilitas kredit.

d. Lembaga Non-Keuangan

PT Telekom Infranasantara (Telekom)

Pada tanggal 21 Januari 2014, Telekom, Entitas Anak, memperoleh fasilitas pinjaman “Mudarabah Islamic Financing (MIF) 1” dari PEPVII HKCo 2 Limited, Hongkong sebesar Rp 455.400.000.000.

Dalam perjanjian MIF 1, diatur antara lain bahwa tingkat pengembalian bagi hasil Mudarabah adalah sebesar 76,92% dari jumlah dividen yang akan didistribusikan oleh Telekom. Sumber pembiayaan dividen tersebut antara lain akan berasal dari penerimaan dividen KIN, Entitas Anak tidak langsung, di masa datang. Jaminan yang diberikan oleh Telekom atas pinjaman ini adalah 527.037.583 saham KIN di Telekom atau setara dengan 53,97% kepemilikan saham.

Pada tanggal 27 Mei 2016, Telekom, Entitas Anak, memperoleh tambahan pinjaman sebesar Rp 126.000.000.000 dari PEP VII HK Co2 Limited, Hongkong, pihak ketiga, yang akan digunakan untuk peningkatan modal Telekom pada KIN.

Selanjutnya sepanjang tahun 2017, Telekom, Entitas Anak, memperoleh tambahan pinjaman sebesar Rp 33.680.570.577 dari PEP VII HK Co2 Limited, Hongkong, pihak ketiga, yang akan digunakan untuk peningkatan modal Telekom pada KIN.

Kepatuhan atas Syarat Pinjaman

Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016, Kelompok Usaha telah memenuhi semua persyaratan pinjaman-pinjaman jangka panjang tersebut di atas seperti disebutkan dalam perjanjian kredit terkait atau memperoleh surat pernyataan pelepasan tuntutan pelunasan (*waiver*) sebagaimana diperlukan.

24. MODAL SAHAM

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh PT Adimitra Transferindo (Biro Administrasi Efek) adalah sebagai berikut:

Pemegang saham	Seri	Saham ditempatkan dan disetor penuh	Persentase kepemilikan	Jumlah
PT Bosowa Utama	A	1	0,00%	35
	B	2.000.000	0,01%	140.000.000
		2.000.001	0,01%	140.000.035
Eagle Infrastructure Fund Limited	B	3.400.000.000	22,32%	238.000.000.000
PT Hijau Makmur Sejahtera	B	3.200.000.000	21,00%	224.000.000.000
Lain-lain (masing-masing kurang dari 5%, termasuk masyarakat)	B	8.633.671.879	56,67%	604.357.031.530
Jumlah		15.235.671.880	100,00%	1.066.497.031.565

Selama tahun 2013, Perusahaan telah melakukan pembelian kembali saham biasa sebanyak 385.454.000 saham melalui Bursa Efek Indonesia (Catatan 1d) senilai Rp 84.522.927.500. Pembelian kembali saham ini ditujukan untuk menstabilkan harga saham Perusahaan akibat kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.1-2/SEOJK.04/ 2013. Perusahaan memiliki hak untuk menerbitkan kembali saham-saham tersebut di masa mendatang. Seluruh saham yang diterbitkan Perusahaan telah disetor penuh. Pembelian ini dicatat pada akun “Saham yang dibeli kembali”.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
PERIODE 6 BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

25. TAMBAHAN MODAL DISETOR - BERSIH

	<u>2 0 1 7</u>	<u>2 0 1 6</u>
Agio saham	1.958.166.045	1.958.166.045
Agio saham dari penawaran umum perdana pada tahun 2001	6.000.000.000	6.000.000.000
Biaya emisi efek dari penawaran umum perdana tahun 2001	(1.298.793.524)	(1.298.793.524)
Agio saham dengan HMETD sebesar 8.476.500.000 saham Seri B dengan nilai nominal Rp 70 per saham dan harga pelaksanaan Rp 88 per saham pada tahun 2010	183.084.950.970	183.084.950.970
Biaya emisi efek dari penawaran umum terbatas tahun 2010	(1.306.306.218)	(1.306.306.218)
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	(32.799.735.420)	(32.799.735.420)
Jumlah	<u>155.638.281.853</u>	<u>155.638.281.853</u>

26. KOMPONEN EKUITAS LAINNYA

Akun ini merupakan selisih atas nilai transaksi entitas non-pengendali sebesar Rp 542.447.958.013 dan Rp 534.394.007.845 masing-masing pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016.

27. KEPENTINGAN NONPENGENDALI

30 Juni 2017					
	Saldo awal	Bagian nonpengendali dan penyesuaian	Bagian laba entitas anak	Laba (rugi) komprehensif lain	Saldo akhir
<u>Penyertaan langsung</u>					
PT Telekom Infra Nusantara	241.364.513.930	32.644.475.556	213.252	-	274.009.202.738
PT Margautama Nusantara	335.986.057.221	(19.767.248.428)	25.237.945.671	-	341.456.754.464
PT Potum Mundi Infranasantara	50.079.079.000	1.625.976.130	61.814	-	51.705.116.944
PT Energi Infranasantara	39.281.626.830	(441.236.416)	24.511	-	38.840.414.925
PT Portco Infranasantara	357.791	1.000.000	69.223	-	1.427.014
Jumlah	<u>666.711.634.772</u>	<u>14.062.966.842</u>	<u>25.238.314.471</u>	<u>-</u>	<u>706.012.916.085</u>
31 Desember 2016					
	Saldo awal	Bagian nonpengendali dan penyesuaian	Bagian laba entitas anak	Laba (rugi) komprehensif lain	Saldo akhir
<u>Penyertaan langsung</u>					
PT Telekom Infra Nusantara	381.408.717.835	(159.624.472.937)	19.566.297.938	13.971.094	241.364.513.930
PT Margautama Nusantara	299.914.897.897	(8.620.759.357)	44.719.857.188	(27.938.507)	335.986.057.221
PT Potum Mundi Infranasantara	34.510.409.028	8.399.997.674	7.173.072.317	(4.400.019)	50.079.079.000
PT Energi Infranasantara	38.998.030.765	-	293.023.396	(9.427.331)	39.281.626.830
PT Portco Infranasantara	327.821	-	29.970	-	357.791
Jumlah	<u>754.832.383.346</u>	<u>(159.845.234.620)</u>	<u>71.752.280.809</u>	<u>(27.794.763)</u>	<u>666.711.634.772</u>

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
PERIODE 6 BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

28. LABA BERSIH PER SAHAM DASAR

Rincian perhitungan laba per saham adalah sebagai berikut:

	Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	Jumlah rata- rata tertimbang saham	Laba <i>per</i> saham
Periode 6 bulan yang berakhir			
30 Juni 2017	124.991.331.339	15.235.671.880	8,20
30 Juni 2016	108.927.817.565	15.235.671.880	7,15

29. PENDAPATAN DAN PENJUALAN

	2 0 1 7	2 0 1 6
Pendapatan jalan tol		
Ruas Pondok Ranji - Pondok Aren	98.576.464.500	95.162.235.500
Ruas Tallo - Bandara Hasanuddin	53.889.535.500	58.089.061.000
Ruas Pelabuhan Soekarno Hatta - Pettarani	40.134.683.500	37.970.886.000
Pendapatan sewa properti investasi	141.366.575.995	113.956.325.088
Penjualan air bersih	18.940.272.948	11.279.865.074
Pendapatan jasa manajemen	1.027.624.517	860.585.760
Jumlah	353.935.156.960	317.318.958.422

Pendapatan jalan tol dihitung dari jumlah kendaraan yang lewat dikalikan dengan tarif menurut golongan kendaraan. Tarif tol yang ditetapkan didasarkan pada:

- Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang No. 13 Tahun 1980 tentang Jalan.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2005 sebagai pengganti PP No. 8 Tahun 1990 dan PP No. 40 Tahun 2001.

Undang-undang dan PP tersebut merupakan landasan hukum perhitungan/penyesuaian tarif tol yang kemudian ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

Berdasarkan PP No. 15 Tahun 2005, Pasal 66 Ayat (1) dinyatakan: "Tarif dihitung berdasarkan kemampuan bayar pengguna jalan tol, besar keuntungan biaya operasi kendaraan, dan kelayakan investasi unsur-unsur kelayakan investasi" dan Pasal 66 Ayat (2): "Besar keuntungan biaya operasi kendaraan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dihitung berdasarkan pada selisih biaya operasi kendaraan dan nilai waktu pada jalan tol dengan lintas alternatif jalan umum yang ada".

Rincian tarif tol terjauh pada tanggal 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Ruas Jalan Tol	Golongan				
	I	II	III	IV	V
Biringkanaya (Makassar)	8.500	12.500	16.500	21.000	25.000
Ujung Pandang Tahap I dan II	3.500	4.500	5.500	7.000	8.500
Pondok Ranji dan Pondok Aren	6.000	11.000	13.000	16.500	19.500

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
PERIODE 6 BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

29. PENDAPATAN DAN PENJUALAN (Lanjutan)

Pada tanggal 4 Juni 2015, Menteri Pekerjaan Umum melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.309/KPYS/M/2015 tentang "Penyesuaian Tarif Tol Pada Jalan Tol Makassar Seksi IV", menetapkan penyesuaian tarif tol pada ruas tol JTSE, Entitas Anak.

Sedangkan untuk BSD keputusan kenaikan tarif baru ditetapkan pada tanggal 1 November 2015 dan BMN keputusan kenaikan tarif baru ditetapkan tanggal 28 Oktober 2015.

Penjualan air bersih merupakan penjualan air bersih dari JSMN, DCC dan STR, Entitas-Entitas Anak tidak langsung.

Pendapatan sewa properti investasi merupakan pendapatan sewa menara telekomunikasi berasal dari KIN, Darma, dan Quattro, Entitas-entitas Anak tidak langsung.

Pendapatan jasa manajemen merupakan pendapatan atas jasa manajemen yang diberikan oleh TBN, Entitas Anak tidak langsung, kepada PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri, Entitas Asosiasi.

Pada tanggal 30 Juni 2017 dan 2016 tidak terdapat pendapatan dari pelanggan yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan usaha dan penjualan konsolidasian.

30. PENDAPATAN DAN BEBAN KONSTRUKSI

Pendapatan konstruksi merupakan jasa kompensasi yang diakui oleh Entitas anak untuk peningkatan kapasitas produksi air bersih. Pendapatan konstruksi dinilai dengan menggunakan metode cost-plus, yang mana seluruh biaya yang dapat diatribusikan langsung sebagai nilai perolehan aset tambahan dengan margin tertentu.

Pendapatan konstruksi dan beban untuk periode 6 bulan yang berakhir 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp 1.299.695.100 dan Rp 1.181.541.000 pada tahun 2017 dan Rp 273.628.053 dan Rp 248.752.775 pada tahun 2016.

31. BEBAN LANGSUNG DAN BEBAN POKOK PENJUALAN

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Beban langsung		
Beban pengumpul pendapatan jalan tol	15.115.376.674	13.882.146.426
Beban pemeliharaan jalan tol	5.225.298.320	5.783.747.330
Beban pelayanan pemakai jalan tol	5.422.871.560	4.826.114.338
	<u>25.763.546.554</u>	<u>24.492.008.094</u>
Amortisasi aset takberwujud	34.571.064.128	31.639.563.365
Beban langsung properti investasi	26.159.716.680	23.809.780.298
Beban jasa konsesi	545.755.726	2.950.572.888
Beban pokok pengolahan air	5.079.755.328	1.316.971.590
	<u>61.116.837.412</u>	<u>60.208.896.235</u>
Jumlah	<u><u>92.119.838.416</u></u>	<u><u>84.208.896.235</u></u>

PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
PERIODE 6 BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. BEBAN LANGSUNG DAN BEBAN POKOK PENJUALAN (Lanjutan)

Rincian beban langsung dan beban pokok penjualan adalah sebagai berikut:

a. Beban pengumpul pendapatan tol

	2 0 1 7	2 0 1 6
Gaji dan tunjangan	6.530.829.448	6.222.665.437
Bagi hasil pengoperasian gerbang tol Pondok ranji	5.010.309.363	4.836.688.102
Penyusutan	1.613.196.953	460.931.230
Bahan bakar, listrik dan air	1.147.003.545	1.176.441.124
Administrasi dan perlengkapan	327.284.347	660.935.899
Imbalan pasca-kerja (Catatan 37)	234.077.241	234.077.241
Perbaikan dan pemeliharaan	228.708.515	260.507.577
Asuransi	20.781.262	26.713.816
S e w a	3.186.000	3.186.000
Jumlah	15.115.376.674	13.882.146.426

b. Beban pemeliharaan jalan tol

	2 0 1 7	2 0 1 6
Perbaikan dan pemeliharaan	3.702.452.385	4.323.342.253
S e w a	847.271.088	819.400.001
Asuransi	362.334.908	350.060.544
Gaji dan tunjangan	249.860.895	227.284.093
Bahan bakar, listrik dan air	35.128.347	32.651.242
Imbalan pasca-kerja (Catatan 37)	28.250.697	28.250.697
Pajak bumi dan bangunan	-	2.758.500
Jumlah	5.225.298.320	5.783.747.330

c. Beban pelayanan pemakai jalan tol

	2 0 1 7	2 0 1 6
Gaji dan tunjangan	1.900.904.469	1.948.178.927
Penyusutan	1.691.469.517	1.035.475.710
Biaya kompensasi	884.172.241	853.533.194
Perbaikan dan pemeliharaan	562.169.719	582.513.153
Bahan bakar, listrik dan air	220.477.519	253.584.859
Imbalan pasca-kerja (Catatan 37)	84.752.095	84.752.095
Pajak dan iuran	76.480.000	68.076.400
Lainnya	2.446.000	-
Jumlah	5.422.871.560	4.826.114.338

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
PERIODE 6 BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

31. BEBAN LANGSUNG DAN BEBAN POKOK PENJUALAN (Lanjutan)

d. Beban langsung properti investasi

	2 0 1 7	2 0 1 6
Kantor	10.290.718.009	9.493.605.533
Amortisasi	7.531.551.577	7.298.044.775
Perbaikan dan pemeliharaan	3.601.674.605	3.071.400.563
Gaji dan tunjangan	1.324.146.976	1.353.455.784
Lain-lain	2.365.738.120	2.593.273.643
Jumlah	25.113.829.288	23.809.780.298

Untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dan 2016, tidak ada transaksi dengan pemasok yang berjumlah lebih dari 10% dari jumlah beban usaha langsung dan beban pokok penjualan.

32. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	2 0 1 7	2 0 1 6
Gaji dan tunjangan	44.305.765.578	47.991.397.912
S e w a	5.454.878.697	3.679.222.797
Penyusutan dan amortisasi	4.931.326.151	6.390.256.879
Jasa profesional	2.881.417.694	3.228.814.132
Jamuan dan sumbangan	2.349.801.917	2.072.594.061
Transportasi dan perjalanan dinas	2.346.300.271	2.281.683.493
Pajak dan iuran	2.002.730.192	3.870.047.116
Keperluan kantor	1.918.526.002	2.091.973.184
Perbaikan dan pemeliharaan	1.256.204.936	475.212.705
Alat tulis kantor dan rumah tangga	1.090.193.438	2.229.358.966
Listrik, air dan telekomunikasi	1.032.799.524	1.048.760.745
Akomodasi, rapat dan keanggotaan	879.682.782	643.448.176
Pelatihan dan seminar	69.036.419	155.958.100
Lain-lain (dibawah Rp 200.000.000)	4.081.039.529	2.920.126.006
Jumlah	74.599.703.130	79.078.854.272

33. PENGHASILAN KEUANGAN

	2 0 1 7	2 0 1 6
Bunga deposito dan jasa giro	10.638.091.169	15.572.542.516
Bunga pinjaman	2.601.138.200	1.168.631.225
Bunga investasi	-	10.957.681.953
Jumlah	13.239.229.369	27.698.855.694

PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
PERIODE 6 BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

34. BEBAN KEUANGAN

	2 0 1 7	2 0 1 6
Bunga pinjaman bank	77.902.612.536	84.316.420.989
Beban administrasi bank	638.678.627	2.557.909.573
Provisi pinjaman	490.940.680	475.565.230
Bunga utang pembiayaan konsumen	102.301.613	112.720.286
Jumlah	79.134.533.456	87.462.616.078

35. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF

	Nilai wajar utang dalam Rupiah	
	2 0 1 7	2 0 1 6
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Hongkong	515.808.150.027	471.297.430.100
ING Bank N.V., Amsterdam	332.500.000.000	332.500.000.000
Jumlah	848.308.150.027	803.797.430.100

Pada tanggal 25 November 2016, KIN mengadakan *cross currency swap* dengan HSBC, Hongkong, dimana KIN menyetujui untuk menerima bunga USD berdasarkan LIBOR ditambah 4,25% untuk periode sejak 14 Desember 2016 sampai 20 Oktober 2021, membayar bunga sebesar tingkat tertentu (*strike*) sebagaimana diatur dalam perjanjian dengan rata-rata nilai tukar Rupiah dengan USD atau pada tingkat bunga 9,3% - 9,36% mana yang lebih tinggi.

Pada tanggal 25 November 2016, KIN mengadakan *cross currency swap* dengan ING Bank N.B, Amsterdam, Belanda (ING), dimana KIN menyetujui untuk menerima bunga USD berdasarkan LIBOR ditambah 4,25% untuk periode sejak 13 Desember 2016 sampai 19 Oktober 2021, membayar bunga sebesar tingkat tertentu (*strike*) sebagaimana diatur dalam perjanjian dengan rata-rata nilai tukar Rupiah dengan USD atau pada tingkat bunga 10,45% mana yang lebih tinggi.

Perjanjian KIN dengan HSBC dan ING juga menyetujui untuk menerima USD dalam jumlah sebagaimana diatur dalam perjanjian selama nilai tukar Rp/USD berada pada atau di bawah Rp 15.300 pada setiap tahun yang disepakati dan menyetujui untuk membayar sejumlah Rupiah dengan nilai tukar Rp/USD sebesar Rp 15.300. Apabila nilai tukar Rp/USD berada diatas Rp 15.300, tidak ada transaksi *cross currency swap* yang akan dilakukan.

Kontrak ini berlaku efektif sejak tanggal 13 Desember 2016 dan 14 Desember 2016 dan yang akan berakhir masing-masing pada tanggal 19 Oktober 2021 dan 20 Oktober 2021, KIN melakukan lindung nilai atas perubahan nilai wajar kewajiban dengan risiko fluktuasi nilai tukar Rp/USD, sehubungan dengan pinjaman sindikasi (Catatan 23b).

Pada tanggal 22 Desember 2016, KIN mengadakan transaksi *cross currency swap* dengan HSBC dengan tingkat bunga berdasarkan LIBOR ditambah 4,25% untuk periode 5 tahun yang berakhir pada tanggal 25 Oktober 2021.

Perubahan neto nilai wajar atas instrumen-instrumen derivatif di atas sebesar disajikan pada akun "Laba perubahan nilai wajar derivatif - Neto" laba rugi konsolidasian.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
PERIODE 6 BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

36. INFORMASI MENGENAI PIHAK-PIHAK BERELASI

Sifat Hubungan Dengan Pihak-Pihak Berelasi

Dalam kegiatan usaha normal, Kelompok Usaha melakukan transaksi usaha dan keuangan dengan pihak-pihak berelasi tertentu. Sifat dari hubungan Kelompok Usaha dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Pihak-pihak berelasi	Sifat dari hubungan	Sifat dari transaksi
PT Intisentosa Alambahtera	Entitas asosiasi tidak langsung	Piutang non-usaha (modal kerja)
PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri	Entitas asosiasi tidak langsung	Piutang usaha

Transaksi Dengan Pihak Berelasi

Rincian saldo yang timbul dari transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	2017	2016	2017	2016
Piutang non-usaha				
PT Intisentosa Alambahtera	0,842%	0,874%	47.812.173.268	48.232.176.593
Direktur Perusahaan	0,016%	0,021%	908.403.302	1.158.929.366
Jumlah	0,858%	0,895%	48.720.576.570	49.391.105.959
			2017	2016
Penjualan				
PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri			1.027.624.517	860.585.760

Piutang kepada PT Intisentosa Alambahtera merupakan piutang modal kerja berdasarkan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham tanggal 3 April 2012 yang dikenakan bunga sesuai dengan USD LIBOR ditambah 3,5% per tahun. Piutang ini berjangka waktu selama 4 tahun. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada 31 Desember 2017.

Manajemen tidak melakukan pembentukan penyisihan penurunan nilai atas piutang tersebut karena manajemen berkeyakinan bahwa piutang tersebut akan tertagih.

Kompensasi jangka pendek manajemen kunci

Kelompok Usaha memberikan kompensasi jangka pendek kepada Dewan Komisaris dan Direksi masing-masing sebesar Rp 5.404.703.893 dan Rp 7.495.081.407 untuk tahun yang berakhir 30 Juni 2017 dan 2016.

37. LIABILITAS IMBALAN PASCA-KERJA

Pada laporan keuangan interim konsolidasian periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2017, Kelompok Usaha mencatat liabilitas imbalan pasca-kerja karyawan berdasarkan perhitungan internal, sedangkan untuk laporan keuangan konsolidasian tahun yang berakhir 31 Desember 2016, Kelompok Usaha mencatat berdasarkan perhitungan aktuaris independen yang dilakukan oleh PT Dayamandiri Dharmakonsilindo dalam laporannya tertanggal 2 Maret 2017 dengan asumsi-asumsi utama sebagai berikut:.

	2017	2016
Tingkat diskonto per tahun	8,35%	8,35%
Tingkat kenaikan gaji per tahun	10,0%	10,0%
Tingkat kematian	TMI - 2011	TMI - 2011
Usia pensiun normal	55 tahun	55 tahun
Tingkat pengunduran diri per tahun	10%	10%

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
PERIODE 6 BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

37. LIABILITAS IMBALAN PASCA-KERJA (Lanjutan)

Mutasi liabilitas imbalan pasca-kerja yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Saldo awal	36.067.939.047	28.758.899.275
Beban tahun berjalan dicatat ke laba rugi	1.196.943.969	9.225.766.603
Pembayaran tahun berjalan	(214.283.640)	(1.852.868.736)
Penghasilan komprehensif lain	-	192.727.942
<i>Excess payment</i>	-	(256.586.037)
Saldo akhir	37.050.599.376	36.067.939.047

38. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI

Entitas anak

a. PT Bintaro Serpong Damai (BSD)

(i) Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan (PKP) Jalan Tol

BSD mengadakan Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan Jalan Tol dengan PT Jasa Marga (Persero) Tbk (Jasa Marga), sebagai pemegang hak Jalan Tol Pondok Aren - Serpong, sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 183 tanggal 19 Desember 1996 dari Sutjipto, S.H., notaris di Jakarta. Dalam perjanjian ini, Jasa Marga menunjuk dan memberi wewenang kepada BSD sebagai pengembang tunggal untuk membangun dan mengoperasikan jalan tol atas nama Jasa Marga serta menyelenggarakan manajemen jalan tol dengan risiko dan biaya yang ditanggung sendiri oleh BSD selama 27 tahun, termasuk masa pembangunannya. Selama masa operasi, BSD wajib membayar kepada Jasa Marga sejumlah persentase tertentu dari hasil jalan tol setiap bulannya.

Jasa Marga telah memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. S543/MK.16/1996 tanggal 25 Oktober 1996 untuk mengadakan Perjanjian tersebut.

Berdasarkan Undang-undang No. 38 tahun 2004 tentang jalan dan Peraturan Pemerintah No. 25 tentang jalan tol, Pemerintah telah menyerahkan sebagian wewenang jalan tol kepada Kementerian Pekerjaan Umum diwakili oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) yang berkaitan dengan pengaturan, pengusahaan dan pengawasan yang sebelumnya dikelola oleh Jasa Marga. Atas hal tersebut, BSD diwajibkan untuk mengganti PKP menjadi Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT).

Pada tanggal 31 Agustus 2010, BSD mengadakan PPJT dengan BPJT Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dengan Surat Perjanjian No. 01/PPJT/VIII/KE/2010 tanggal 31 Agustus 2010 yang dinyatakan dalam Akta No. 22 tanggal 31 Agustus 2010 dari Rina Utami Djauhari, S.H., notaris di Jakarta. Dalam perjanjian ini, BPJT menunjuk dan memberikan kepada BSD hak melaksanakan jalan tol ruas Pondok Aren - Serpong dengan masa konsesi hingga tanggal 1 Oktober 2028. Selama masa operasi, BSD wajib melakukan:

- 1) Pemeliharaan sesuai dengan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh BPJT
- 2) Pelebaran jalan dan pembangunan simpang susun sesuai dengan rencana bisnis BSD atau permintaan BPJT (dengan syarat dan kondisi tertentu)
- 3) Pembangunan jalan akses sesuai dengan permintaan BPJT (dengan kondisi tertentu)
- 4) Menyediakan asuransi sebagai perlindungan aset jalan tol

Selain hal tersebut, BSD, selama masa konsesi, dapat memanfaatkan ruang milik jalan tol untuk penempatan iklan, utilitas dan/ atau bangunan utilitas. Pada akhir masa pengusahaan jalan tol, BSD akan menyerahkan jalan tol tersebut kepada BPJT.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
PERIODE 6 BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

38. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (Lanjutan)

Entitas anak (Lanjutan)

a. PT Bintaro Serpong Damai (BSD) (Lanjutan)

(i) Perjanjian Kerjasama Pengoperasian dan Pemeliharaan (PKPP)

Pada tanggal 19 Mei 1998, BSD dan Jasa Marga mengadakan Perjanjian Kerjasama Pengoperasian dan Pemeliharaan (PKPP) Jalan Tol Pondok Aren - Serpong. Berdasarkan perjanjian tersebut, BSD menyerahkan pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol kepada Jasa Marga dimana BSD berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana pelayanan dan pengamanan dalam kegiatan operasi jalan tol dan pemeliharaan sesuai standar Jasa Marga. Oleh karena itu, BSD akan menerima pembagian pendapatan dengan ketentuan untuk kapasitas dibawah 120.000 kendaraan per hari, tarif pembagiannya adalah sebagai berikut:

Periode Perjanjian	BSD	Jasa Marga	Beban Pemeliharaan
Di bawah 10 tahun	81,75%	0%	18,25%
10 - 15 tahun	77,75%	4%	18,25%
16 - 20 tahun	72,75%	9%	18,25%
Di atas 20 tahun	69,75%	12%	18,25%

Untuk kapasitas di atas 120.000 kendaraan adalah sebesar 50% setelah dikurangi biaya operasi dan pemeliharaan sebesar 18,25%.

Bagi hasil pada periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2017 dan 2016 dicatat pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebagai "Biaya Pengumpul Pendapatan Tol" dan "Biaya Pelayanan Pemakai Jalan Tol" dengan pengalokasian masing-masing sebesar 85%.

Berdasarkan Surat Permohonan Arbitrase No. 070/R&ASrt.G/I/06 tanggal 18 Januari 2006 yang telah didaftarkan di Sekretariat Badan Arbitrase Nasional Indonesia No. 217/I/ARB Bani/2006 tanggal 23 Januari 2006, BSD telah mengajukan permohonan arbitrase ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk membatalkan Perjanjian Kerjasama Pengoperasian dan Pemeliharaan Jalan Tol Pondok Aren Serpong No. 004/SPK DIR/1998 serta menuntut ganti kerugian sebesar Rp 2.100.000.000. Hasil dari perkara arbitrase tersebut sudah diputuskan dalam surat Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No. 217/I/ARBBANI/2006 tanggal 31 Agustus 2006.

Berdasarkan keputusan di atas, BSD dan Jasa Marga sepakat untuk merubah lingkup pengoperasian menjadi sebagai berikut:

Jasa Marga:

- 1) Pengoperasian gerbang tol Pondok Ranji (Pondok Aren Timur);
- 2) Pelayanan lalu lintas dan keamanan pengguna jalan tol, serta pengamanan aset.

BSD:

- 1) Pengoperasian gerbang tol Pondok Aren Barat;
- 2) Pemeliharaan jalan tol Pondok Aren-Serpong.

Selanjutnya, berdasarkan keputusan BANI No. 06.465/IX/BANI/Ktd tanggal 4 September 2006, pengoperasian gerbang Tol Pondok Aren Barat dan pemeliharaan jalan tol Pondok Aren - Serpong dilakukan sepenuhnya oleh BSD, berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2006. Selain itu, pada putusan tersebut, BSD dan Jasa Marga ditetapkan untuk menunjuk konsultan penilai independen untuk melakukan penghitungan ulang atas bagi hasil pengelolaan Jalan Tol Pondok Aren

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
PERIODE 6 BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

38. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (Lanjutan)

Entitas anak (Lanjutan)

a. PT Bintaro Serpong Damai (BSD) (Lanjutan)

(ii) Perjanjian Kerjasama Pengoperasian dan Pemeliharaan (PKPP) (Lanjutan)

Dalam laporannya bertanggal 2 November 2009, PT Utama Penilai, penilai independen, menetapkan:

- 1) Persentase bagi hasil baru yaitu sebesar 94,02% untuk BSD dan 5,98% untuk Jasa Marga. Persentase tersebut telah disepakati bersama pada tanggal 22 Januari 2010;
- 2) Kompensasi yang harus dibayarkan BSD kepada Jasa Marga akibat perubahan lingkup PKPP hingga akhir konsesi.

Selanjutnya, pada tanggal 13 Juli 2010, BSD dan Jasa Marga dengan menggunakan perhitungan dan asumsi yang dipakai oleh PT Utama Penilai menyepakati liabilitas bagi hasil termasuk kompensasinya sampai dengan tanggal 31 Mei 2010 yaitu sebesar Rp 20.344.195.391 (termasuk PPN). Liabilitas tersebut telah dilunasi BSD pada tahun 2011.

(iii) Perjanjian Sewa Tanah

Pada tanggal 17 April 1997, BSD dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) mengadakan perjanjian sewa tanah milik KAI seluas 43.088,41 m² selama 5 tahun dari tanggal 17 April 1997 sampai dengan tanggal 17 April 2002. Perjanjian tersebut dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Berdasarkan addendum perpanjangan perjanjian sewa tanah tanggal 23 Maret 2007, kedua belah pihak setuju untuk memperpanjang jangka waktu sewa.

Berdasarkan "Perjanjian Sewa Lahan di Jalur Kereta Api" No. 22/BSDT/PKS/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016, BSD dan KAI menyepakati harga dari sewa lahan milik KAI sebesar Rp 3.530.931.250 dan berdasarkan perjanjian "Pengawasan Keamanan Operasional Jalur Kereta Api" No 023/BSDT/PKS/VI/2016, BSD dikenakan biaya pengawasan operasional pada lahan milik KAI sebesar Rp 564.506.250. Harga sewa tersebut untuk masa pemanfaatan tanggal 17 Oktober 2011 sampai tanggal 30 Juni 2016 dan masa perjanjian ini berakhir pada tanggal 16 Oktober 2016.

Sampai dengan tanggal pelaporan, BSD masih bernegosiasi mengenai perpanjangan perjanjian sewa lahan KAI.

b. PT Bosowa Marga Nusantara (BMN)

Dalam Keputusannya No. 276/KPTS/1994 tanggal 26 Agustus 1994, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia telah memberikan izin kepada PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JM) untuk menyelenggarakan tol Ujung Pandang dalam ikatan usaha patungan dengan BMN.

Berdasarkan Akta No. 322 tanggal 29 Agustus 1994 dari notaris Mestariy Habie, S.H., BMN mengoperasikan jalan tol selama 30 (tiga puluh) tahun untuk tahap pertama sedangkan tahap kedua akan diatur kemudian dengan ketentuan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) tahun sejak dioperasikannya jalan tol, baik sebagian atau seluruhnya.

BMN setuju bahwa setelah berakhirnya masa penyelenggaraan jalan tol, maka jalan tol dan fasilitas yang berada dalam daerah milik jalan langsung dengan serta merta kembali kepada Jasa Marga. Jasa Marga berhak untuk mengoperasikan dan memelihara jalan tol tanpa wajib menyerahkannya atau membayarkannya kepada BMN.

Perjanjian kontrak kerjasama tersebut berlaku untuk tol seksi I, II dan III. Berdasarkan keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 402/KPTS/M/2010 tanggal 12 Juli 2010 menetapkan dan menyetujui untuk mengeluarkan tol seksi III dari ruang lingkup kewajiban BMN tanpa merubah tarif awal dan masa konsesi.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
PERIODE 6 BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

38. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (Lanjutan)

Entitas anak (Lanjutan)

b. PT Bosowa Marga Nusantara (BMN) (Lanjutan)

Berdasarkan Surat Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor JL. 01.03-Mn/518 tanggal 21 September 2005 dan pengumuman pemenang tender investasi jalan tol dari Departemen Pekerjaan Umum nomor JL.01.03-PB/69 tanggal 27 September 2005, ditetapkan bahwa pemenang tender investasi jalan tol ruas Makassar seksi IV adalah BMN.

Berdasarkan Undang-undang No. 38 tahun 2004 tentang jalan dan Peraturan Pemerintah No. 25 tentang jalan tol, Pemerintah telah menyerahkan sebagian wewenang jalan tol kepada Departemen Pekerjaan Umum diwakili oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) yang berkaitan dengan pengaturan, perusahaan dan pengawasan yang sebelumnya dikelola oleh Jasa Marga. Atas hal tersebut, BMN diwajibkan untuk mengganti Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan (PKP) menjadi Perjanjian Perusahaan Jalan Tol (PPJT).

Pada tanggal 31 Agustus 2010, BMN mengadakan PPJT dengan BPJT Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dengan Surat Perjanjian No. 02/PPJT/VIII/KE/2010 tanggal 31 Agustus 2010 yang dinyatakan dalam Akta No. 23 dari Rina Utami Djauhari, S.H., notaris di Jakarta, tanggal 31 Agustus 2010. Dalam perjanjian ini, BPJT menunjuk dan memberikan kepada BMN hak melaksanakan jalan tol ruas Ujung Pandang Seksi I dan II dengan masa konsesi hingga tanggal 12 April 2028.

c. PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE)

JTSE mengadakan Perjanjian Perusahaan Jalan Tol dengan Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia (DPU), sebagai pemegang hak Jalan Tol Ruas Makassar Seksi IV, dengan Surat Perjanjian No. 190/PPJT/V/Mn/2006 tanggal 29 Mei 2006. Dalam perjanjian ini, DPU menunjuk dan memberikan kepada JTSE, hak untuk membangun dan mengoperasikan jalan tol atas nama pemerintah dan menyelenggarakan manajemen jalan tol dengan risiko dan biaya yang ditanggung sendiri oleh JTSE dengan masa konsesi selama 35 tahun, termasuk masa pembangunannya. Selama masa operasi, JTSE wajib melaksanakan pemeliharaan dan menyediakan asuransi sebagai perlindungan aset jalan tol. Selain hal tersebut JTSE selama masa konsesi dapat memanfaatkan ruang milik jalan tol untuk penempatan iklan, utilitas dan/atau bangunan utilitas. Pada akhir masa perusahaan jalan tol, JTSE akan menyerahkan jalan tol tersebut kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

d. PT Inpola Meka Energi (IME)

Pada tanggal 28 Desember 2009, IME melakukan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) untuk Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) di Lau Gunung, Sumatera Utara.

Dalam perjanjian tersebut, IME akan membangun PLTM Lau Gunung dengan kapasitas terpasang sebesar 2x5 MW, yang meliputi pembuatan desain, rancang bangun, penyediaan biaya untuk pembangunan, pengujian dan *commissioning* serta mengoperasikan dan pemeliharaan.

Selanjutnya IME setuju untuk menjual seluruh tenaga listrik yang dihasilkan atau dihasilkan dari PLTM Lau Gunung kepada PLN sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang disepakati. Kerjasama ini akan berlangsung sampai dengan 20 tahun, terhitung dari pertama kali energi listrik disalurkan dari PLTM Lau Gunung kepada PLN.

Sampai dengan tanggal posisi Laporan Keuangan, telah dilakukan tiga kali adendum yang mengubah kesepakatan terkait jangka waktu pelaksanaan pembangunan yang disepakati dalam perjanjian induk.

Pada tanggal 5 Mei 2014, IME menandatangani Perjanjian Penyediaan Jasa Pemborongan dengan PT PP (Persero) Tbk, pihak ketiga, terkait pembangunan PLTM Lau Gunung. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 540 hari kalender, terhitung sejak pelunasan uang muka proyek dan pengurusan perizinan yang diperlukan.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
PERIODE 6 BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

38. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (Lanjutan)

Entitas anak (Lanjutan)

e. PT Dain Celicani Cemerlang (DCC)

Pada tanggal 24 April 2012, DCC menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Penyediaan Air Bersih dengan PT Kawasan Industri Medan (Persero) (KIM) dengan jangka waktu 20 tahun (belum termasuk waktu pembangunan). Dalam perjanjian tersebut, DCC akan membangun Instalasi Pengolahan Air (IPA) di atas tanah KIM seluas 8.873,68 m² dengan bentuk kerjasama *Build Operate Transfer* (BOT) dengan kesepakatan volume air bersih yang disalurkan di titik penyerahan minimum sebesar 250.000 m³/bulan dengan harga Rp 5.800 per m³ (tidak termasuk PPN). Harga tersebut akan dievaluasi dan disetujui setiap 3 tahun. Pada tanggal 21 April 2017, KIM telah menyetujui kenaikan tarif sebesar 10% sehingga harga meningkat menjadi Rp 6.380 per m³ (tidak termasuk PPN).

Selanjutnya, DCC wajib membangun IPA jika kebutuhan air KIM telah melebihi 250.000 m³/bulan dengan harga yang akan dievaluasi dan disesuaikan sebesar 10% setiap 3 tahun atau setiap terjadinya kenaikan tarif listrik, BBM dan lainnya yang mempengaruhi langsung biaya produksi. DCC dan KIM sepakat untuk hanya menggunakan air permukaan sungai Deli dan sumber air permukaan lainnya di area KIM dengan kapasitas maksimum sebesar 1.000 liter/detik.

Jangka waktu perjanjian ini dapat diperpanjang namun jika tidak diperpanjang, DCC harus secara otomatis menyerahkan seluruh sarana dan prasarana serta IPA kepada KIM.

Perjanjian ini tidak memasukan adanya opsi pembaharuan perjanjian kecuali terjadinya keadaan kahar sesuai yang dijelaskan dalam perjanjian tersebut. Pengakhiran perjanjian dapat dilakukan jika KIM tidak melaksanakan pembayaran, DCC tidak menyalurkan air bersih atau salah satu pihak mengalami kepailitan sesuai yang dijelaskan dalam perjanjian.

f. PT Sarana Catur Tirta Kelola (SCTK)

(i) Perjanjian Pertahapan Pelaksanaan Pekerjaan Konsesi Pembangunan, Pengoperasian, Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pendistribusian Air Bersih

Berdasarkan perjanjian tanggal 29 November 1995 perihal perjanjian Kerja Sama antara Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) II Serang dan SCTK yang diwakili oleh STR, yang telah diubah pada tanggal 24 Desember 2013, tentang Pentahapan Pelaksanaan Pekerjaan Konsesi meliputi pekerjaan Pembangunan, Pengoperasian, Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pendistribusian Air Bersih, SCTK dan PDAM sepakat untuk/bahwa:

- 1) Memanfaatkan Instalasi Pengolahan Air (IPA) berkapasitas 100 liter/detik yang akan diserap hingga tahun 2015,
- 2) Membangun IPA berkapasitas 175 liter/detik pada tahun 2014 yang akan terserap habis hingga tahun 2018.
- 3) Membangun IPA berkapasitas 100 liter/detik pada tahun 2018 yang akan terserap habis hingga tahun 2021.
- 4) Jangka waktu Perjanjian Konsesi untuk pembangunan IPA yang ada dengan kapasitas 100 liter/detik adalah 30 tahun, dimulai tanggal 1 Juni 1996 dan berakhir pada tanggal 30 Mei 2026.
- 5) Jangka waktu Amandemen Perjanjian Konsesi adalah selama 25 tahun sejak selesainya pembangunan IPA tahap I pada tahun 2014 dan akan berakhir pada tahun 2039.
- 6) SCTK wajib membayar pajak air baku kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp 100,98 per meter kubik.
- 7) SCTK memberikan 2% dari setiap meter kubik air yang terjual setiap bulannya kepada PDAM.
- 8) PDAM berhak menerima royalti air berupa curah secara cuma-cuma sebesar 7,5% dari volume penjualan ke industri.
- 9) Menyerahkan dalam kondisi baik dan dapat dioperasikan seluruh fasilitas sistem penyediaan air minum SCTK kepada PDAM saat perjanjian kerjasama ini berakhir;
- 10) Mengelola sumber air baku untuk diproduksi dan didistribusikan untuk memenuhi kapasitas produksi sebesar 375 liter/detik, dan dapat ditingkatkan atas persetujuan para pihak apabila kapasitas dan ketersediaan air baku memungkinkan.
- 11) Tarif air minum ditetapkan Bupati Serang berdasarkan usulan SCTK dan rekomendasi dari PDAM;
- 12) Pengalihan saham SCTK pada perusahaan baru, ke afiliasi SCTK atau ke pihak lain yang menyebabkan kepemilikan saham SCTK secara keseluruhan berkurang dari 51%, harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PDAM.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
PERIODE 6 BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

38. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (Lanjutan)

Entitas anak (Lanjutan)

f. PT Sarana Catur Tirta Kelola (SCTK) (Lanjutan)

(i) Perjanjian Pengembangan Penyediaan Air Bersih Serang Timur

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama tanggal 14 Januari 1999 antara STR dan JSNM tentang Pengembangan Penyediaan Air Bersih di Serang Timur dengan kapasitas sampai dengan 100 liter per detik, STR dan JSNM menyepakati kerjasama dalam pengolahan dan pendistribusian air bersih di Serang Timur sesuai dengan ketentuan-ketentuan di perjanjian kerjasama.

Pada tanggal 2 Desember 2013, SCTK dan STR sepakat untuk mengakhiri perjanjian pelimpahan wewenang atas pengolahan air di Serang tertanggal 20 November 1995. Dengan berakhirnya perjanjian pelimpahan wewenang tersebut, maka Perjanjian Kerjasama antara STR dan JSNM juga berakhir. Selanjutnya, pengolahan dan pendistribusian air bersih di Serang Timur menjadi wewenang SCTK.

39. INFORMASI SEGMENT

Berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh manajemen dalam mengevaluasi kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimiliki, Kelompok Usaha menggunakan segmen usaha berdasarkan produk dan jasa dan memiliki enam segmen operasi yang dilaporkan berupa jasa pengelola jalan tol, investasi, pelabuhan, penyediaan air, energi, telekomunikasi, eliminasi, dan konsolidasi.

Segmen Usaha	30 Juni 2017							
	Jasa pengelola jalan tol	Investasi	Pelabuhan	Penyediaan air	Energi	Telekomunikasi	Eliminasi	Konsolidasi
Pendapatan	192.600.683.500	-	-	22.503.429.034	-	141.366.575.995	-	356.470.688.530
Beban segmen	(75.811.780.435)	(19.227.318.256)	(66.112.535)	(13.275.573.149)	(2.612.768.589)	(56.907.529.582)	-	(167.901.082.546)
Hasil segment (Bruto)	116.788.903.065	(19.227.318.256)	(66.112.535)	9.227.855.885	(2.612.768.589)	84.459.046.413	-	188.569.605.984
Penghasilan keuangan	2.928.472.867	19.549.408	2.643.148.243	1.822.439.075	3.006.773.636	217.707.941	-	10.638.091.170
Beban keuangan	(26.433.611.990)	(13.130.971.337)	-	(10.184.349.710)	(50.254.318)	(27.964.161.074)	-	(77.763.348.430)
Bagian atas laba entitas asosiasi	25.276.597.428	-	3.676.016.545	1.876.526.885	-	-	-	30.829.140.858
Pendapatan (beban) lain-lain	11.013.882.556	(758.258.793)	755.370.873	1.414.769.846	(10.418.002)	38.103.529.447	-	50.518.875.926
Laba (rugi) sebelum pajak	129.574.243.925	(33.096.998.978)	7.008.423.126	4.157.241.981	333.332.727	94.816.122.727	-	202.792.365.508
Manfaat (beban) pajak penghasilan	(23.529.050.295)	(3.289.843.390)	(86.157.249)	-	-	-	-	(26.905.050.934)
Laba (rugi) bersih	106.045.193.630	(36.386.842.368)	6.922.265.877	4.157.241.981	333.332.727	94.816.122.727	-	175.887.314.574
Informasi lainnya:								
Aset segmen	1.771.057.164.630	2.183.315.328.724	298.111.929.917	528.081.272.137	316.823.050.061	2.617.268.438.604	(2.034.564.080.555)	5.680.093.103.517
Aset Pajak Tangguhan	454.726.518	72.625.598.636	-	1.669.330.647	5.733.794.833	2.312.064.820	-	82.795.515.454
Liabilitas segmen	570.915.148.469	482.702.444.428	148.129.157.250	228.440.330.451	222.495.304.422	1.716.111.692.430	(614.159.516.681)	2.754.634.560.769

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
PERIODE 6 BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

39. INFORMASI SEGMENT (Lanjutan)

Segmen Usaha	30 Juni 2016							
	Jasa pengelola jalan tol	Investasi	Pelabuhan	Penyediaan air	Energi	Telekomunikasi	Eliminasi	Konsolidasi
Pendapatan	191.222.182.500	-	-	19.095.503.204	-	113.956.325.088	-	324.274.010.792
Beban segmen	(70.957.066.734)	(27.393.857.158)	(65.645.081)	(11.093.277.551)	(2.504.664.242)	(51.521.992.515)	-	(163.536.503.281)
Hasil segment (Bruto)	120.265.115.766	(27.393.857.158)	(65.645.081)	8.002.225.653	(2.504.664.242)	62.434.332.573	-	160.737.507.511
Penghasilan keuangan	4.169.079.108	(251.097.408)	4.471.089.706	13.645.251.464	5.073.185.354	591.347.470	-	27.698.855.694
Beban keuangan	(32.299.741.534)	(6.191.654.906)	(1.198.831)	(9.574.667.419)	(2.731.494.932)	(36.663.858.456)	-	(87.462.616.078)
Kenaikan nilai wajar properti	-	-	-	-	-	46.775.369.169	-	46.775.369.169
Bagian atas laba entitas asosiasi	14.226.862.374	-	4.808.517.068	1.200.423.013	-	-	-	20.235.802.455
Denda pajak	(679.973.788)	(1.137.225.992)	-	(1.000.000)	(84.776.555)	(25.074.457)	-	(1.928.050.792)
Pendapatan (beban) lain-lain	25.658.594.780	(49.725.972)	(2.204.177.675)	77.818.893	(1.349.511)	(2.715.573.357)	-	20.765.587.158
Laba (rugi) sebelum pajak	131.339.936.706	(35.023.561.436)	7.008.585.187	13.350.051.604	(249.099.886)	70.396.542.942	-	186.822.455.117
Manfaat (beban) pajak penghasilan	(18.574.610.734)	2.222.973.001	-	-	-	-	-	(16.351.637.733)
Laba (rugi) bersih	112.765.325.972	(32.800.588.435)	7.008.585.187	13.350.051.604	(249.099.886)	70.396.542.942	-	170.470.817.384
Informasi lainnya:								
Aset segmen	1.722.763.775.779	1.945.699.148.024	286.975.140.587	487.341.778.898	305.722.854.499	2.470.274.847.962	(1.722.109.987.942)	5.496.667.557.807
Aset Pajak Tangguhan	1.653.637.738	61.185.902.689	-	2.926.690.603	3.488.401.913	53.437.953	-	69.308.070.896
Liabilitas segmen	648.557.947.546	385.035.382.344	148.884.710.875	364.698.671.035	212.890.150.505	1.604.211.330.772	(614.159.516.682)	2.750.118.676.395
Liabilitas pajak tangguhan	27.727.681.268	-	-	-	-	59.158.728.931	-	86.886.410.199

40. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Mengingat bahwa penerapan praktik manajemen risiko yang baik dapat mendukung kinerja Kelompok Usaha, maka manajemen risiko selalu menjadi elemen pendukung penting bagi Kelompok Usaha dalam menjalankan usahanya. Sasaran dan tujuan utama dari diterapkannya praktik manajemen risiko di Kelompok Usaha adalah untuk menjaga dan melindungi Kelompok Usaha melalui pengelolaan risiko kerugian yang mungkin timbul dari berbagai aktivitasnya serta menjaga tingkat risiko agar sesuai dengan arahan yang sudah ditetapkan oleh manajemen Kelompok Usaha.

Kelompok Usaha memiliki eksposur terhadap risiko-risiko atas instrumen keuangan seperti: risiko kredit, risiko suku bunga dan risiko likuiditas.

a. Risiko suku bunga atas nilai wajar dan arus kas

Risiko suku bunga atas nilai wajar dan arus kas adalah risiko dimana nilai wajar dan arus kas masa datang dari instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar.

Eksposur Kelompok Usaha terhadap suku bunga timbul dari pinjaman bank. Pinjaman bank pada suku bunga variabel tersebut mempengaruhi arus kas Kelompok Usaha atas risiko suku bunga yang sebagian saling hapus dengan kas yang ditempatkan pada suku bunga variabel. Untuk meminimalisir risiko suku bunga, Kelompok Usaha mengatur biaya bunga dengan mengevaluasi kecenderungan suku bunga pasar. Manajemen melakukan penilaian terhadap suku bunga yang ditawarkan bank untuk memperoleh suku bunga yang paling menguntungkan sebelum mengambil keputusan sehubungan dengan penempatan dan mengadakan perjanjian pinjaman baru.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
PERIODE 6 BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

40. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

b. Risiko Mata Uang

Risiko mata uang adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Selain itu, pendapatan dan pengeluaran Kelompok Usaha hampir seluruhnya diterima dan dibayarkan dalam mata uang Rupiah.

Kelompok usaha menggunakan instrumen keuangan derivatif terutama *cross currency swaps* untuk mengelola liabilitas kelompok usaha sesuai dengan kebijakan keuangan Kelompok Usaha (Catatan 35).

c. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko di mana salah satu pihak atas instrumen keuangan akan gagal memenuhi liabilitasnya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan. Risiko kredit dihadapi Kelompok Usaha berasal dari kredit yang diberikan kepada pelanggan tertentu. Kelompok Usaha memberikan pembayaran secara kredit hanya dengan pihak ketiga yang diakui dan kredibel.

Selain itu, saldo piutang dimonitor secara berkelanjutan dengan tujuan bahwa eksposur Kelompok Usaha terhadap piutang yang tidak tertagih tidak signifikan.

Kas dan setara kas ditempatkan pada lembaga keuangan yang teratur dan bereputasi. Eksposur maksimal atas risiko kredit adalah sebesar nilai tercatat dari setiap jenis aset keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Manajemen yakin terhadap kemampuan untuk mengendalikan dan menjaga eksposur risiko kredit pada tingkat yang minimal. Eksposur maksimum risiko kredit pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

	2017		2016	
	Nilai tercatat	Maksimum eksposur	Nilai tercatat	Maksimum eksposur
<u>Aset Keuangan</u>				
Kas dan setara kas	527.315.126.469	527.315.126.469	624.321.538.450	624.321.538.450
Aset keuangan lancar lainnya	65.058.880.000	65.058.880.000	-	-
Investasi jangka pendek	150.022.603.650	150.022.603.650	150.022.603.650	150.022.603.650
Piutang usaha	85.103.872.237	85.103.872.237	75.986.984.916	75.986.984.916
Piutang non-usaha - Pihak ketiga	68.598.846.565	68.598.846.565	58.259.296.291	58.259.296.291
Uang muka investasi dan piutang investasi	293.689.795.077	293.689.795.077	252.304.318.265	252.304.318.265
Bank yang dibatasi penggunaannya	44.921.716.189	44.921.716.189	46.555.017.512	46.555.017.512
Jumlah	1.234.710.840.187	1.234.710.840.187	1.207.449.759.084	1.207.449.759.084

d. Risiko Likuiditas

Manajemen telah membentuk kerangka kerja manajemen risiko likuiditas untuk pengelolaan dana jangka pendek, menengah dan jangka panjang dan persyaratan manajemen likuiditas. Kelompok Usaha mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan cadangan yang memadai dan dengan terus memantau rencana dan realisasi arus kas dengan cara pencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Tabel di bawah ini merupakan jadwal jatuh tempo liabilitas keuangan Kelompok Usaha berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan pada tanggal 30 Juni 2017:

	Kurang dari 1 tahun	1 - 2 tahun	Lebih dari 3 tahun	Jumlah
Utang usaha	24.016.150.507	-	-	24.016.150.507
Utang non-usaha	150.555.008.147	-	-	150.555.008.147
Beban akrual	33.293.318.950	-	-	33.293.318.950
Utang pembiayaan konsumen	1.399.151.087	672.534.344	-	2.071.685.431
Pinjaman jangka panjang	167.292.409.739	414.465.845.635	1.719.864.367.836	2.301.622.623.210
Jumlah	376.556.038.430	415.138.379.979	1.719.864.367.836	2.511.558.786.245

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
PERIODE 6 BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

40. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

e. Risiko Permodalan

Tujuan utama Kelompok Usaha dalam mengelola permodalan adalah melindungi kemampuan Kelompok Usaha dalam mempertahankan kelangsungan bisnisnya. Dengan demikian, Kelompok Usaha dapat memberikan imbal hasil yang memadai kepada para pemegang saham serta juga sekaligus memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya.

Dalam mengelola permodalan tersebut, manajemen senantiasa memperhatikan pemeliharaan rasio modal yang sehat antara jumlah liabilitas dan ekuitas. Penyesuaian terhadap struktur keuangan dilakukan berdasarkan perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik risiko aset yang mendasari. Di samping itu, kebijakan diarahkan untuk mempertahankan struktur permodalan yang sehat guna mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang wajar.

Dalam memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Kelompok Usaha dapat menerbitkan saham baru, mengusahakan pendanaan melalui pinjaman, melakukan restrukturisasi terhadap utang yang ada ataupun menjual aset untuk mengurangi pinjaman. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses terhadap manajemen permodalan selama periode penyajian.

Berikut adalah *gearing ratio* yang merupakan perbandingan antara jumlah liabilitas (dikurangi kas dan setara kas) terhadap jumlah ekuitas pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016.

	2 0 1 7	2 0 1 6
Pinjaman	2.303.694.308.641	2.370.305.220.854
Kas dan setara kas	(527.315.126.469)	(624.321.538.450)
Pinjaman - bersih	1.776.379.182.172	1.745.983.682.404
Ekuitas	2.869.399.576.680	2.691.994.133.860
Rasio pinjaman - bersih terhadap modal	0,62	0,65

Estimasi Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

PSAK 68, "Pengakuan Nilai Wajar" mensyaratkan pengungkapan atas pengukuran nilai wajar dengan tingkat hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Pengukuran nilai wajar Tingkat 1 yang diperoleh dari harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset dan liabilitas yang identik;
- Pengukuran nilai wajar Tingkat 2 yang diperoleh dari input selain dari harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi harga); dan
- Pengukuran nilai wajar Tingkat 3 yang diperoleh dari teknik penilaian yang memasukkan input untuk aset dan liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

Pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016, aset keuangan Kelompok Usaha masing-masing adalah sebesar Rp 1.234.710.840.187 dan Rp 1.207.449.759.084 yang mencerminkan sekitar 21,74% dan 21,87% dari jumlah aset pada tanggal pelaporan.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
PERIODE 6 BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

40. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

e. Risiko Permodalan (Lanjutan)

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan mendekati nilai tercatatnya, karena dampak dari diskonto tidak signifikan, adalah sebagai berikut:

	<u>2 0 1 7</u>	<u>2 0 1 6</u>
A S E T		
<u>Tersedia untuk dijual</u>		
Aset keuangan yang tersedia untuk dijual	65.058.880.000	-
<u>Dimiliki hingga jatuh tempo</u>		
Investasi jangka pendek	150.022.603.650	150.022.603.650
<u>Pinjaman dan piutang</u>		
Kas dan setara kas	527.315.126.469	624.321.538.450
Piutang usaha	85.103.872.237	75.986.984.916
Piutang non-usaha	116.411.019.833	107.650.402.250
Uang muka investasi dan piutang investasi	263.432.930.310	252.304.318.265
Bank yang dibatasi penggunaannya	44.921.716.189	46.555.017.512
Instrumen derivatif	-	11.115.410.181
Jumlah	<u>1.252.266.148.688</u>	<u>1.267.956.275.224</u>
LIABILITAS		
<u>Liabilitas keuangan lainnya</u>		
Utang bank jangka pendek	35.000.000.000	35.000.000.000
Utang usaha	24.016.150.507	43.661.723.838
Utang non-usaha	150.555.008.147	137.401.776.382
Beban akrual	33.293.318.950	26.317.288.126
Pinjaman jangka panjang	2.301.622.623.210	2.329.895.174.575
Utang pembiayaan konsumen	2.071.685.431	5.410.046.279
Jumlah	<u>2.546.558.786.245</u>	<u>2.577.686.009.200</u>